

**Pengembangan Masyarakat
dan Kajian Pedesaan Secara Partisipatif**

Dr. Ir. Suswadi, M.Si

Dr. Ir. Suswadi, M.Si

Pustaka
Bintang
Kelas



Pengembangan Masyarakat dan Kajian Pedesaan Secara Partisipatif

Pengembangan Masyarakat dan Kajian Pedesaan Secara Partisipatif

Penulis dan Penyusun
Dr. Ir. Suswadi, M.Si

Penyunting
**Erlina Zachi, Anisa Nur Septiana,
Ainusshoffa Rahmatiah**

Foto dan Gambar
Prima Swastika

Layout
Prima Swastika

ISBN :
978-623-98211-6-6

Diterbitkan oleh



Jl. Sutandyo No. 62B Menggungan, Sawahan,
Ngemplak, Boyolali
Telp: (0271) 7469005

KATA PENGANTAR

Pengembangan masyarakat yang lebih penting adalah memfasilitasi bagaimana mengembalikan kepercayaan petani bagaimana cara mengatasi permasalahannya dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Proses penyadaran diri ini memang bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan waktu, kesabaran serta pengkayaan metodologi pada penyuluh pertanian menjadi sangat penting. Dalam penyuluhan pengkajian masalah secara mendalam adalah prasarat utama, karena dalam penyuluhan yang dilakukan secara temporer tidak akan mampu menemukan akar permasalahan sebenarnya yang dihadapi petani, sehingga apabila dilakukan penyuluhan maka penyuluhan tersebut juga tidak akan menjawab masalah yang dihadapi petani. Selain itu dalam penyuluhan, penyuluh selain menggali permasalahan secara mendalam juga harus digali potensi yang ada pada petani, selanjutnya petani diajak diskusi bersama untuk memahami cara memecahkan masalah yang didasarkan pada potensi yang ada dan dimiliki oleh petani, cara seperti ini merupakan tahap awal dalam proses penyadaran, karena pada tahap ini petani akan diajak untuk menemukan masalah dan cara pemecahannya secara sendiri.

Metode Participatory Rural Appaisal / PRA adalah pengkajian pedesaan partisipatif merupakan pendekatan pengembangan program. PRA sedang populer dilingkungan lembaga-lembaga pengembangan program maupun perguruan tinggi di Indonesia. Metode ini mempunyai dasar pemikiran bahwa suatu pendekatan pengembangan masyarakat yang benar-benar melibatkan masyarakat yang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan sebuah program. Keberhasilan sebuah program diartikan tidak hanya pembangunan secara fisik dan peningkatan pendapatan masyarakat, melainkan juga pembagunan manusianya atau mencerdaskan manusianya.

Dalam metode PRA tercakup cita-cita Penguatan (pemberdayaan) masyarakat. Artinya masyarakat diupayakan agar memiliki pandangan terbuka terhadap keadaan hidupnya sendiri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk secara mandiri mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk diperlukan proses penyadaran, pembelajaran, dan ketrampilan kepada masyarakat. Caranya antara lain dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat yang memberi peluang besar agar mereka menjadi pelaku aktif semua prses kegiatan tersebut, sehingga sethapp semi sethapp mereka menerima pengalihan kemampuan.

Buku ini membahas sebagai salah satu aspek pendekatan pengembangan program secara partisipatif yang tercakup didalam metode PRA. Metode mengharapkan perubahan sosial kearah yang lebih baik. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk Petugas Program baik dilingkungan masyarakat, lembaga maupun perguruan tinggi mengenai pengembangan program secara partisipatif. Di sadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, berharap pembaca dapat memberi masukan untuk perbaikan kedepan.

Surakarta, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 Pembangunan Masyarakat (Community Development).....	9
1.1. Pendahuluan	9
1.2. Sejarah	11
1.3. Paradigma	12
1.4. Paradigma Konsep CD (Community Development).....	14
1.5. Prinsip Pengembangan Masyarakat	16
1.7. Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat	19
1.8. Proses Pengembangan Masyarakat.....	20
BAB 2 Kemandirian Masyarakat	24
2.1. Partisipasi.	25
BAB 3 Pendidikan Orang Dewasa	29
A. Prinsip-prinsip belajar untuk orang dewasa	31
B. Karakteristik warga belajar dewasa.....	32
C. Karakteristik pengajar orang dewasa	32
BAB 4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	34
A. Pengertian pemberdayaan masyarakat.....	34
B. Bias bias pemberdayaan	36
C. Perspektif pemberdayaan	37
BAB 5 PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	43
1.1 Peranan LSM	43
BAB 6 PRA (Participatory Rural Appraisal)	45
1. Latar belakang penggunaan PRA.....	45
2. Pemahaman konsep dasar PRA.....	47
3. Dimensi Perilaku dari PRA	48
4. Tujuan PRA	48
5. Prinsip-prinsip PRA:.....	49
6. Pembentukan Tim PRA.....	51

7. Persiapan Lapang	54
8. Penyusunan Rencana	54
9. Sosialisasi	54
10. Menciptakan suasana belajar bersama.....	55
11. Beberapa Metode dasar untuk PRA:.....	56
12. Tehnik-tehnik PRA	57
BAB 7 Pengorganisasian Masalah dan Analisis Gagasan Pemecahan Masalah.....	66
BAB 8 Perencanaan Desa menggunakan Metodologi P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa)	72
Daftar Pustaka	78

Pembangunan Masyarakat (Community Development)

1.1. Pendahuluan

Pembangunan pertanian yang ada selama ini lebih mementingkan dan berorientasi pada produksi, maksudnya adalah bagaimana hasil pertanian dipacu semaksimal mungkin. Dengan orientasi tersebut akhirnya pembangunan pertanian lebih mengutamakan pada inovasi dan teknologi yang bersifat modern. Para pendamping pertanian ada yang menganggap bahwa kalau menginginkan produksi pertanian meningkat maka harus meninggalkan sistem pertanian konvensional. Perencanaan penyuluhan dibuat secara terpusat, tanpa memperhatikan potensi-potensi lokal yang ada. Dari program modernisasi pertanian memang berdampak pada peningkatan hasil pertanian terutama hasil pertanian padi. Yaitu pada tahun 1984 Indonesia pernah berswasembada beras. Tetapi prestasi tersebut tidak dapat berlanjut, dan bahkan Indonesia setelah tahun tersebut selalu mengimport beras dalam jumlah yang besar. Hal tersebut terjadi karena produksi padi ditingkat petani terjadi penurunan, sedangkan biaya usaha tani yang dikeluarkan oleh petani justru semakin meningkat. Sedangkan ditingkat petani tidak ada kemampuan untuk berbuat sesuatu guna meningkatkan produksi tanaman padinya. Hal ini terjadi karena sudah tidak ada kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki oleh diri petani. Petani selama ini telah diajari untuk tergantung pada orang luar, baik itu inovasi teknologi, serta modal untuk usaha taninya. Tetapi setelah pemerintah tidak lagi banyak untuk mendukung dan mensubsidi sarana pertanian, maka banyak petani yang mengalami permasalahan. Karena harga-harga sarana produksi pertanian harganya melambung, kondisi lahan sudah terlanjur rusak. Sedangkan inovasi teknologi lokal yang biayanya relative murah sekarang sudah hilang, serta budaya-budaya lokal yang juga bisa mendukung dalam usaha pertanian juga sudah tidak dikenal oleh petani lagi, contohnya seperti pranotomongso.

Di dalam penyuluhan yang lebih penting adalah Penyuluh memfasilitasi bagaimana mengembalikan kepercayaan petani bagaimana cara mengatasi permasalahannya dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Proses penyadaran diri ini memang bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan waktu, kesabaran serta pengkayaan metodologi pada penyuluh pertanian menjadi sangat penting. Dalam penyuluhan pengkajian masalah secara mendalam adalah prasarat utama, karena dalam penyuluhan yang dilakukan secara temporer tidak akan mampu menemukan akar permasalahan sebenarnya yang dihadapi petani, sehingga apabila dilakukan penyuluhan maka penyuluhan tersebut juga tidak akan menjawab masalah yang dihadapi petani. Selain itu dalam penyuluhan, penyuluh selain menggali permasalahan secara mendalam juga harus digali potensi yang ada pada petani, selanjutnya petani diajak diskusi bersama untuk memahami cara memecahkan masalah yang didasarkan pada potensi yang ada dan dimiliki oleh petani, cara seperti ini merupakan tahap awal dalam proses penyadaran, karena pada tahap ini petani akan diajak untuk menemukan masalah dan cara pemecahannya secara sendiri. Hal ini kalau dilakukan akan menjadikan petani akan semakin percaya kepada dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada pada usaha taninya dan tidak hanya tergantung pada penyuluh saja. Karena permasalahan akan selalu muncul pada setiap saat, dan ini kalau hanya menggantungkan kepada penyuluh tentunya akan sangat berat.

Seperti yang dikatakan Mardikanto (2003) bahwa, salah satu prinsip penyuluhan yang harus diingat oleh seorang penyuluh adalah, *“penyuluhan harus selalu mengacu kepada kebuthan sasarannya”*.

Oleh sebab itu, agar pelaksanaan penyuluhan memperoleh tanggapan yang baik dari sasarannya, setiap penyuluh harus selalu berupaya untuk dapat:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sasaran,
- 2) Menunjukkan kepada sasaran tentang adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya.
- 3) Membantu sasaran untuk memenuhi kebutuhannya.

Berkaitan dengan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sasaran sebagaimana dikemukakan di atas, perlu dipahami bahwa, pada dasarnya ada dua macam kebutuhan, yaitu, kebutuhan nyata (*“real need”*) dan kebutuhan yang dirasakan (*“feld need”*).

Kebutuhan nyata adalah kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, sedang kebutuhan yang dirasakan adalah kebutuhan yang benar-benar sudah dirasakan.

Dalam hubungan seperti ini, tugas setiap penyuluh adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menunjukkan kepada sasarannya tentang “felt need” yang benar-benar merupakan “real need”, dan mengarahkannya agar mereka tidak terlalu memikirkan felt need yang bukan merupakan real need, tetapi sebaliknya harus berupaya membantu sasaran memenuhi felt need yang benar-benar merupakan real need.
- 2) Berupaya agar semua real need dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat sasarannya sebagai felt need, untuk selanjutnya memberikan bantuannya demi pemenuhan real need tersebut.

1.2. Sejarah

Pada tahun 1948, Kementerian Jajahan (Colonial Office) Pemerintah Inggris mengadakan konferensi yang bertujuan untuk membangkitkan prakarsa masyarakat Afrika untuk membangun diri sendiri. Konferensi ini disusul oleh konferensi tentang perbaikan pertanian Afrika, dan pada tahun 1951 konferensi tentang pemerintahan local Afrika. Konferensi 1948 di atas berpendapat bahwa konsep pendidikan masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Sejak itu diperkenalkan konsep alternatif yaitu pembangunan komunitas (*community development*). Pada tahun 1948 itu juga dikeluarkan instruksi (dispatch) kepada para gubernur jajahan Inggris di Afrika bahwa pendidikan masyarakat atau pembangunan komunitas, dan pembinaan pemerintah local, dijadikan ujung tombak kebijakan kolonial pemerintah Inggris di Afrika.

Di masa itu, Departemen Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan masyarakat. Dengan instruksi 1948 ternyata ruang lingkup pembangunan yang diselenggarakannya jauh melampaui kewenangan dan kemampuan Departemen tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 1949 dibentuk sebuah Panitia bernama The Committee on Mass Education (Community Development) yang bertugas mempelajari perkembangan keadaan, pembaruan konsep, dan penemuan langkah langkah baru yang perlu diambil, serta upaya pengorganisasian program diseluruh jajahan Inggris.

Perkembangan keadaan pada awal tahun 50-an, mengangkat isu tentang kebijaksanaan social (*Social policy*) kepermukaan. Konsep tentang kesejahteraan social (*social welfare*) menjadi pokok pembahasan. Dibentuklah Panitia Ahli tentang kesejahteraan Sosial (Social Welfare Advisory Committee) disamping panitia yang telah ada yaitu panitia Pendidikan Masyarakat (Committee on Mass Education) yang disebut juga Panitia Pembangunan Komunitas (Community Development).

Tetapi kemudian Kementerian Jajahan memandang perlu untuk menggabungkan kedua panitia tersebut. Demikianlah pada bulan September 1953, kedua panitia dilebur dan dibentuklah Panitia tentang Pembangunan Sosial (Advisory Committee on Social Development) yang bertugas menyiapkan rekomendasi tentang peningkatan kesejahteraan social, pembangunan komunitas, kerjasama antar lembaga social, dan latihan pekerja social dan pembangunan komunitas.

1.3. Paradigma

Menurut Mansour Fakih (2000), Pembangunan dimulai sejak akhir Perang Dunia ke Dua, gagasan pembangunan dilontarkan sekitar tanggal 20 Januari 1949, yakni ketika Presiaden Harry S. Truman untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, yakni dengan melontarkan istilah yang baru diciptakan “keterbelakangan” (underdevelopment). Inilah saat pertama diskursus pembangunan secara resmi diluncurkan, yakni dalam kaitan dan konteks “Perang dingin”. Maksud kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Dunia Ke Tiga (Lummis,1991) dalam Mansour Fakih (2000).

Untuk menyebarkan gagasan Pembangunan ke Dunia Ke Tiga, pada tahun 1950an dan 1960 an para ahli ilmu social, terutama pakar ilmu social yang tergabung dalam dalam Center For International Studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT), berperan dalam membantu menyelenggarakan lokakarya yang berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang Pembangunan (Gendzier, 1985) dalam Mansour Fakih (2000).

Sepanjang periode itu, para ahli ilmu social sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori tentang Pembangunan dan Modernisasi. Dalam masa itulah, pakar ekonomi seperti W.W. Rostow menciptakan “ Teori Pertumbuhan” dan ahli ilmu social lainnya seperti David McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan teori mengenai “Modernisasi”

Teori ini juga diadopsi oleh Negara-negara Dunia Ketiga dalam menghadapi masalah kemiskinan, bangsa-bangsa Dunia Ketiga mengawali pembangunan nasionalnya dengan pembangunan ekonomi, terutama pertanian, agar segera taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Masih dibidang ekonomi, pembangunan pertanian kendatipun belum mendekati sasaran, disusul dengan industrialisasi dan investasi besar-besaran (big push), dengan harapan kekayaan kelompok kecil diatas bisa menetes kemasyarakat miskin di bawah. Harapan ini, yang oleh berbagai sumber disebut *trickle down effects*, dan disinggung oleh Bintoro Tjokroamijojo dan Mustopodidjojo dalam Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (1984), belum

menjadi kenyataan. Pertumbuhan Ekonomi tidak dengan sendirinya membawa efek positif terhadap bidang-bidang lainnya, bahkan dalam satu dan lain kasus, membawa dampak sebaliknya, yaitu dampak negatif. Pengalaman setelah beberapa decade menunjukkan penduduk miskin tetap miskin, jurang antara si-miskin dengan si-kaya semakin lebar dan dalam. Seperti yang di ungkapkan oleh Mansour Fakhri (2000), Salah satu dampak Pembangunan/Modernisasi yang paling dramatis di Dunia Ketiga dapat dilihat dalam kasus Revolusi Hijau (Green Revolution).

Sepanjang program Revolusi Hijau, empat puluh abad pengetahuan pertanian rakyat Dunia Ketiga mulai disingkirkan dan dimusnahkan. Revolusi Hijau, sebagai bentuk Pembangunan dan Modernisasi pertanian yang dirancang oleh perusahaan multinasional dan patriarki Barat, menghomogenkan keberagaman alam dan keberagaman pengetahuan manusia menjadi pola pertanian reduksionis (Shiva, 1989, dalam Mansour Fakhri, 2000).

Mansour Fakhri (1996), konsep pembangunan yang dominan, yang diterapkan di kebanyakan negara dunia ketiga, mencerminkan paradigma pembangunan model barat, dalam konsep ini pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”. Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Konsep pembangunan ini memiliki akar sejarah dan intelektual pada periode perubahan social yang berkaitan dengan revolusi industri. Bagi sebagian besar dunia ketiga pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi, yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara yang lainnya. Dari perspektif ini, peran pemerintah menjadi subyek Pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai obyek, resipien atau penerima, klien atau bahkan partisipan pembangunan.

Kutipan tulisan Logan oleh Taliziduhu Ndraha (1990), yang berpendapat bahwa kesukaran memecahkan lingkaran setan kemiskinan terletak pada system social, dipandang perlu memburu model atau strategi alternatif. Dilihat dari sudut ini, model perubahan social dianggap sebagai salah satu strategi alternatif yang dimaksud.

Perubahan social itu sendiri perlu digerakan dan didorong. Salah satu kekuatan penggerak dan pendorong perubahan social (yang direncanakan) adalah Pembangunan Masyarakat (Community development) demikian Dan A. Chekki dalam Chekki, ed., (1979) yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (1990)

Di sampaikan oleh Paulus Wirutomo, dkk (2003), semenjak tumbuh kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) meninggalkan

permasalahan kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakmertaan dalam pembagian manfaat, maka berkembanglah berbagai pandangan yang ingin memberikan alternatif kepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, diantaranya teori-teori *redistribution with growth*, *human development*, dan *people-centered development*.

Diskursustentang strategi pembangunan tersebut berlangsung cukup lama, yang intinya mencoba mengakhiri era "*delivered development*" dimana pembangunan pembangunan dirancang sepenuhnya dari atas dan menempatkan warga sebagai obyek, dan (kemudian) segera ingin digantikan oleh era "*participatory development*" dimana pembangunan dirancang dari bawah dengan melibatkan warga, dan penempatan mereka sebagai subyek dalam proses pembangunan.

Adanya upaya untuk mengurangi dominasi pemerintah, dalam hal ini terdapat dua isu diantaranya adalah:

Pertama, dalam konteks pemecahan masalah atas ketergantungan hubungan antara negara (state) dengan komuniti (community), terjadi upaya evolutif untuk menggeser "beban" dan tanggung jawab (*shifting of burden and responsibility*) dalam menanggulangi kemiskinan dari negara ke komuniti. Komitmen pemerintah untuk "memajukan kesejahteraan umum" tidak (lagi) harus diartikan sebagai pemerintah turun tangan sepenuhnya, namun cukup dengan mengatur saja. Kondisi yang harus diciptakan oleh pemerintah adalah mendorong tumbuhnya kelembagaan local yang benar-benar berasal dari (prakarsa) komuniti, dibangun dan dikembangkan oleh komuniti, dan dirancang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan kebutuhan komuniti itu sendiri. Kelembagaan local ini, dengan demikian, harus mampu dan sanggup "menjembatani" kepentingan pelayanan oleh negara kepada rakyat dan (sekaligus) kepentingan menyuarkan lokalitas.

Kedua, kelembagaan lokal harus memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan. Untuk itu, dalam perspektif pemberdayaan komuniti (community empowerment), perlu dikembangkan kebiasaan "belajar " diantara sesama sebagai sarana untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas local.

1.4. Paradigma Konsep CD (Community Development)

A. Difinisi community development:

Pada tahun 1955 PBB, membuat suatu difinisi mengenai pembangunan masyarakat (*Community development*): Istilah Pembangunan masyarakat dalam arti sebagai proses, Baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan masyarakat, dalam rangka

memperbaiki kondisi masyarakat dibidang ekonomi, social, dan cultural, serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberi kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Selanjutnya definisi tersebut banyak mendapatkan berbagai kritikan karena dianggap bahwa definisi tersebut sudah terlalu lama dipakai, ketika sebagian besar program pembangunan masyarakat diatur oleh pemerintah kolonial.

Pada mulanya PBB menganggap definisi ini sebagai suatu proses perkembangan. Tetapi kemudian PBB menyatakan bahwa: Pembangunan masyarakat juga diartikan sebagai suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan. Dan bila kegiatan pembangunan masyarakat secara resmi diorganisasi dengan administrasi dan petugas atau pelaksana yang terpisah, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu "program". Akhirnya, sampai pada tingkat yang mencerminkan adanya suatu filsafat pembangunan, kadang-kadang disertai semangat fanatisme yang menyala-nyala definisi tersebut dapat disebut suatu pergerakan.

Julius Nyarere, 1973 dalam Djoko Susanto (2003) mengatakan, bahwa pembangunan masyarakat (Community development) akan berhasil memberikan dampak-dampak positif bagi pemenuhan berbagai kebutuhan mereka termasuk disini kebutuhan akan harga diri dan martabatnya, jika anggota-anggota masyarakat diposisikan sebagai pelaku-pelaku (actors) atau subyek pembangunan, bukan sebagai obyek atau sasaran/target pembangunan

Pembangunan masyarakat yang ideal, dari tulisan Taliziduhu Ndraha (1990) mempunyai empat dimensi, yang mana dalam pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dan saling mengisi, dimensi tersebut, yaitu sebagai proses, metode, program dan gerakan social.

1. Menurut Sanders, pembangunan masyarakat dapat dipandang sebagai proses. Proses dalam hubungan ini adalah proses perubahan yang bertahap menuju suatu masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dan menempuh berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Selain itu Nelson, Ramsey dan Verner berpendapat bahwa pembangunan masyarakat tidak lain dari proses pendidikan untuk bertindak. Melalui proses tersebut anggota komunitas diharapkan memperoleh kemampuan untuk berotonomi local. Pendidikan merupakan inti pembangunan masyarakat sebagai proses.
2. Pembangunan masyarakat dapat juga dipandang sebagai metode, titik berat pembangunan masyarakat sebagai metode ialah pada caranya. Pembangunan masyarakat sebagai metode bekerja pada dua cara, yaitu (1) partisipasi

masyarakat dan (2) pengorganisasian masyarakat.

3. Sebagai program, pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Titik berat pembangunan masyarakat sebagai program adalah pada pencapaian tujuan.
4. Pembangunan masyarakat sebagai sebagai gerakan social, pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan suatu idiologi. Idiologi adalah gambaran sistematis suatu cita-cita yang hendak dicapai suatu bangsa. Idiologi mengandung nilai tertinggi yang diyakini kebenarannya . Efektifitas suatu idiologi ditunjukkan oleh kenyataan sejauh mana idiologi itu melahirkan suatu gerakan untuk mewujudkannya.

1.5. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip-prinsip yang menjelaskan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya;

1. Pengembangan Terpadu

Pengembangan yang dilakukan harus terpadu antar beberapa komponen. Komponen yang dimaksud ialah semua anggota masyarakat. Baik yang di bidang keuangan, bidang organisasi, teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lembaga lainnya yang saling berkaitan.

2. Menghargai Hak Asasi Manusia

Pengembangan masyarakat diharapkan tetap menghargai hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak tersebut dan akan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Manusia akan terus berkembang dan mengikuti pembangunan yang ada, tetapi hak asasi manusia adalah yang utama.

3. Pemberdayaan

Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat membuat seseorang terus melakukan kegiatan yang ada. Dengan mengikuti kegiatan tersebut akan terus mengembangkan kemampuan masing-masing individu.

4. Peningkatan Kesadaran pada Hubungan Interaksi antara Individu dengan Proses Politik

Kepentingan politik tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Hal ini harus diketahui masyarakat secara luas. Ketika masyarakat sudah mengetahui hal ini maka kesadaran akan kekuatan politik di lingkungan sosial kita dapat dipahami dengan baik.

5. Basis Kepemilikan dan Peningkatan Rasa Memiliki

Pengembangan masyarakat akan membuat seseorang lebih mengetahui batas-batas dalam lingkungan sosial. Mereka yang mengetahui hal tersebut akan lebih paham dan mengerti dengan baik semua itu. Ketika masyarakat merasa ikut andil dalam sebuah kegiatan maka dapat dikatakan dapat meningkatkan rasa memiliki yang ada di lingkungan masyarakat.

6. Kemandirian

Meningkatkan kemandirian kepada masyarakat dengan cara melakukan program pengembangan. Program ini sendiri akan senantiasa diberikan kepada seluruh anggota masyarakat agar sama-sama merasakan untuk memajukan daerah sendiri.

7. Independensi

Dalam pengembangan masyarakat tidak diikuti dengan embel-embel apapun. Tentusaja kondisi mencerminkan bahwa segala kegiatan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam sebuah program tertentu. Independensi merupakan hal yang pokok.

8. Pendekatan Pembangunan yang organik

Pembangunan yang dilakukan bukan pembangunan yang tanpa direncanakan, melainkan dengan segala rencana yang matang. Perencanaan yang tepat akan membuat semua pengembangan dengan cara pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

9. Pemilihan Ritme Pembangunan

Pemilihan waktu dalam melakukan tindakan pembangunan dalam pengembangan masyarakat merupakan hal yang penting. Harus melakukan kerjasama dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan segala tindakan. Kerjasama dan timeline yang jelas akan membuat pengembangan lebih terarah dan pembangunan dapat berjalan lancar.

10. Pentingnya Pembangunan Komunitas

Pembangunan yang melibatkan organisasi tertentu akan mempermudah dalam melakukan tindakan untuk kepentingan bersama. Mereka yang ada dalam arti komunitas merupakan orang yang lebih memahami keadaan sekitar sehingga tindakan yang dilakukan diharapkan tidak salah sasaran.

11. Keselarasan antara Proses dan Hasil

Setiap proses pengembangan sosial akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hal apa saja yang akan dikembangkan. Semakin

banyak target yang ditetapkan maka akan semakin banyak pula hasil yang akan diperoleh.

12. Keterpaduan Proses

Proses pengembangan yang terjadi dalam masyarakat harus berjalan satu arah dengan tujuan yang sama. Harus ada keselaran proses dalam lingkungan komunitas, keuangan, dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan serta didukung oleh pimpinan daerah.

Keterpaduan ini akan membuat proses akan semakin cepat dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan.

13. Anti Kekerasan

Segala tindakan yang dilakukan merupakan hal-hal yang bersifat positif dan tidak memaksa. Kegiatan ini berjalan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Mengingat pengembangan masyarakat memang ditunjukkan untuk membuat masyarakat lebih mandiri diberbagai bidang.

14. Pengikutsertaan

Menggunakan prinsip pengikutsertaan agar meningkatkan rasa memiliki dan persaudaraan antar anggota masyarakat. Pengembangan masyarakat akan melibatkan banyak orang yang ada di masyarakat bahkan seluruh anggota masyarakat.

15. Kerjasama

Terdapat kerjasama antar kelompok masyarakat. Kerjasama dapat berupa kerjasama individu atau komunitas. Seperti apapun bentuk kerjasamanya akan selalu mengedepankan kepentingan bersama yang akan memupuk rasa kebersamaan antar anggota masyarakat.

16. Hak Komunitas Mendefenisikan Kebutuhan Sendiri

Setiap komunitas dalam masyarakat memiliki hak yang sama terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan. Melalui kepentingan komunitas ini tidak akan dipaksa sama rata antar komunitas satu dengan yang lain.

1.6. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Adapun untuk adanya tujuan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya;

1. Memberdayakan individu dan kelompok

Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan perorangan atau organisasi. Hal ini akan melibatkan banyak orang sehingga akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kepentingan bersama. Pengembangan ini akan membentuk kebiasaan baru dari dalam masyarakat.

2. Membangkitkan partisipasi penuh masyarakat

Partisipasi ini diharapkan pada semua bidang yang terkait. Bidang tersebut tentu membutuhkan banyak partisipasi masyarakat. Semakin banyak partisipan maka akan semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan akan semakin banyak.

3. Perwujudan untuk membangun diri mereka sendiri

Pengembangan masyarakat ini manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang berperan didalamnya dan orang disekitarnya. Membangun masyarakat dengan cara melakukan untuk diri sendiri merupakan salah satu cara yang tepat.

Ketika seseorang sudah memiliki kemauan untuk membangun melalui kemampuan diri sendiri maka sudah dipastikan akan lebih mudah melakukan pengembangan.

4. Mengintegrasikan kelompok masyarakat

Menyatukan berbagai contoh kelompok sosial satu dengan yang lain kemudian memberikan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan masyarakat merupakan sesuatu yang penting. Semakin bersatu antara kelompok satu dengan yang lain maka akan semakin mudah melakukan pengembangan masyarakat.

1.7. Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat

Menurut Sanders Community Development dapat dipandang, sebagai suatu proses, metode, program ataupun gerakan.

1. Community Development sebagai suatu proses.

- Artinya dilihat apa yang sedang terjadi dalam masyarakat (baik sisi strategis maupun psikologisnya).
- Community Development sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap-tahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan dan perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi.
- United Nation:Community Development adalah proses perubahan yang disebabkan atas usaha masyarakat sendiri untuk meningkatkan kondisi social ekonomi masyarakat. Pengembangan masyarakat sebagai suatu metode

2. Community Development sebagai suatu metode

- Carl Taylor (1956): bahwa Community Development merupakan metode dimana sekelompok orang-orang di pedesaan diikutsertakan untuk

memperbaiki kondisi social ekonominya, sehingga mereka menjadi kelompok yang bekerja secara mandiri dalam mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya.

- Secara singkat sebagai suatu metode, Community Development adalah pada teknik atau upaya yang mengandung asas edukatif untuk mengarahkan masyarakat pada mutu dan kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

3. Community Development sebagai suatu program

- Dinyatakan sebagai suatu gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan.
- Dengan menjalankan prosedur, kegiatan-kegiatan dianggap dilaksanakan. Berhubungan dengan bidang-bidang subyek yang khas, seperti kesehatan, kesejahteraan, pertanian, industri dan rekreasi.
- Dunhan: merupakan program yang terorganisir untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui kemandirian dan kooperatif, namun dengan bantuan teknik dari pemerintah atau badan social lain.
- Dengan demikian program Community Development meliputi aspek yaitu: Fisik seperti pembangunan jalan, Sumber daya manusia misalnya pemberian bea siswa, Ekonomi misalnya pengembangan usaha kecil dan Sosial budaya misalnya pelestarian budaya lokal.

4. Community Development sebagai suatu gerakan

- Merupakan suatu perjuangan, sehingga ini menjadi alasan yang membuat orang-orang mengabdikan.
- Cenderung melembaga dan membangun struktur organisasinya sendiri, menerima prosedur dan dan praktisi- praktisi professional.
- Batten: Community Development merupakan gerakan kearah peningkatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat dengan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.
- Sebagai suatu gerakan, Community Development mengandung unsur dinamika yang timbul dari bawah dalam hal ini masyarakat menuju kearah kemajuan.
- Misalnya untuk bisa hidup bebas dari penyakit demam berdarah maka diharapkan masyarakat menjaga lingkungan sekitar tidak menjadi sarang nyamuk dengan melakukan gerakan lingkungan anti genangan air.

1.8. Proses Pengembangan Masyarakat

Aspek terpenting dari proses yaitu bahwa proses harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. proses

pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, aktifis masyarakat atau penyuluh pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri. Hal ini tidak selalu mudah dicapai, karena orang-orang terbiasa dibebankan, dan menyesuaikan dengan pedoman dasar. Namun tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat, tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut. Atau melakukan penerapan kegiatan dan cara intervensi yang sama.

Tahapan intervensi

- *Assessment* (Penilaian)
Bertujuan untuk menentukan ketepatan serta efektivitas program dalam upaya pengembangan masyarakat. *Assessment* ini mencakup *needs assessment*, identifikasi masalah, analisis masalah, dan *resources assessment*.
- *Plan of treatment* (Rencana tindakan)
Adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan.
- *Treatment* (Tindakan)
Mencakup atas tindakan monitoring dan evaluasi. *Monitoring* memberikan dua manfaat yaitu memberikan informasi untuk pegangan sementara program masih sedang berlangsung. Kemudian dilakukannya tindakan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang ditujukan baik kepada pelaksanaan program (proses maupun hasil), maupun kepada kerjasama di antara semua pelaku.
- *Terminasi* (pelepasan)
Merupakan langkah penghentian sementara (sekuensi) kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin kelak ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya.

Stakeholders

Stakeholders dalam pengembangan masyarakat:

1. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana dan menentukan pengalokasian dana, menyediakan pelayanan langsung

kepada masyarakat, membangun proyek, membuat kontrak dengan pihak lain untuk membangun hubungan, membuat hukum, penciptaan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum yang dibuat, melakukan negosiasi dan persuasif guna mendukung program yang telah direncanakan, memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama didepan hukum kemudian membuat rancangan pembangunan.

2. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.
3. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan oleh pemerintah.

B. Komunitas (Community)

Masyarakat di dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti *community* yang juga dapat diindonesiakan menjadi komunitas.

Menurut Paulus Wirutomo (2003), komunitas (*community*), adalah satu kesatuan masyarakat yang ukurannya relatif kecil sehingga terjadi hubungan yang intensif kedalam daripada keluar dan memiliki kesamaan tertentu. Karakteristik komunitas sendiri terdiri dari: (1). *Primordial community*, yakni komunitas yang memiliki kesamaan suku, agama, dan ras, (2). *Occupation community*, yakni komunitas yang anggotanya memiliki kesamaan pekerjaan /profesi; (3). *Special community*, yakni komunitas yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal.

Selanjutnya dijelaskan oleh Susetiawan (1991) komunitas menurut definisi PBB adalah, suatu konsep “komunitas” organis dan fisik yang secara implicit telah masuk dalam suatu teori yang selama ini digunakan sehubungan dengan pembangunan masyarakat, suatu kelompok yang mengadakan kontak secara langsung (face to face) telah dipersatukan atau diikat oleh nilai-nilai serta obyektivitas masing-masing dengan suatu keselarasan dasar (basic harmony) dalam hal minat dan aspirasi (PBB,1971)

Pernyataan ini menegaskan adanya 3 kriteria yang harus kita pikirkan bila kita mencari suatu definisi mengenai istilah komunitas:

- 1) Konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik. Konsep ini menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup disuatu daerah tertentu yang saling mengadakan interaksi. Kedua konsep daerah tempat tinggal dan interaksi langsung adalah sama-sama penting. Pada dasarnya orang tidak akan mengatakan bahwa penduduk suatu desa pada saat ini adalah sama dengan penduduk yang telah bermigrasi ke daerah lain karena walaupun mereka merasakan atau memiliki berbagai hal yang prinsipnya sama tetapi

mereka tidak tinggal ditempat yang sama. Demikian pula “komunitas “ tidak akan digunakan untuk menggambarkan adanya sekelompok masyarakat yang berdiam di pinggiran kota besar, karena penduduk tersebut jarang sangat jarang berhubungan langsung antara yang satu dengan yang lainnya (tingkat menengah atau atas). Interaksi diantara anggota komunitas disebabkan adanya saling ketergantungan ekonomis, hubungan social, atau eksistensi beberapa bentuk organisasi politik serta perpaduan factor-faktor tersebut.

- 2) Anggota komunitas pada umumnya memiliki beberapa cirri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai sebuah kelompok. Memang tidak mungkin untuk menggeneralisasikan cirri-ciri khas mana yang dianggap penting, karena cirri-ciri semacam ini sangat bervariasi antara satu komunitas dan komunitas yang lain; tetapi factor bahasa, kesukuan atau daerah asal, agama, kultur, pola dan sikap hidup biasanya merupakan factor-faktor yang sangat bernialai.
- 3). Sebuah komunitas seharusnya memiliki suatu keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi. Bagi perencanaan hal ini memang penting karena hal itu menandakan bahwa anggota komunitas cenderung untuk memiliki pola piker dan sikap hidup yang sama terhadap pembangunan dimasa depan, khususnya dalam hal kebutuhan serta usulan-usulanya. Akibatnya para perencana akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat, dan akan memperoleh semacam consensus atau kesamaan pendapat bila perencana tersebut melakukan pekerjaan di tempat yang telah ia kenal.

Komunitas selain menjadi subyek dalam pembangunan masyarakat tetapi juga menjadi bagian yang harus dikembalikan menjadi komunitas yang solid, seperti yang dijelaskan oleh Holt, Rinehart and Wiston, (1968) dalam Taliziduhu Ndraha (1990) mengungkapkan, bahwa perubahan social mempunyai dampak negatif yaitu merosot atau lenyapnya rasa atau kesadaran berkomunitas (loss of sense of community). Oleh sebab itu Pembangunan Masyarakat tidak lain dari usaha untuk memulihkan atau membentuk kembali karakteristik komunitas yang telah hilang, seperti solideritas, kebersamaan, gotong royong kekeluargaan dan sebagainya.

BAB 2

Kemandirian Masyarakat

Sistem pendekatan pembangunan yang lama (modernisasi) adalah terpusat pada peran pemerintah. Semua organisasi rakyat diseragamkan dan dikooptasi oleh pemerintah agar mudah dikendalikan, akibatnya *Sense of Organizing* dan menjadi “automistik” yaitu merasa tak punya dukungan organisasi. Hal ini membuat rakyat tergantung pada pemerintah. Bila pemerintah bertekad memasuki paradigma pembangunan berpusat pada masyarakat, maka perlu dibudayakan nilai “kemandirian” dikalangan masyarakat.

Menurut Paulus Wirutomo, (2003), Kemandirian mempunyai 2 aspek, internal dan eksternal.

1. Aspek internal adalah kemauan dan kemampuan warga untuk mengambil inisiatif, melakukan pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan tanpa menggantungkan diri pada pemerintah termasuk menggalang kekuatan inklusif. Pengembangan kemandirian warga amat tergantung sejauh mana pemerintah siap mengalihkan wewenang pelaksanaan pembangunan pada masyarakat.
2. Secara eksternal sikap mandiri adalah sikap yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, dan mampu bersaing dengan kekuatan dari luar . Nilai ini amat penting bagi warga Survive dalam era globalisasi.

Kemandirian merupakan indikator terpenting, sebagai suatu prasyarat utama bagi suatu masyarakat. Dilihat dari sudut ini, masyarakat yang dianggap dapat berfungsi sebagai subyek pembangunan ialah masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri atau masyarakat mandiri. Secara konseptual masyarakat mandiri ialah masyarakat yang mampu mengendalikan atau mempengaruhi masa depannya sendiri (Talizinduhu Ndraha, 1990)

Tetapi bukan suatu komunitas yang menutup diri seperti apa yang dikatakan Bambang ismawan (1999) kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam pengertian social atau pergaulan antar manusia (kelompok, komunitas), kemandirian juga bermakna sebagai oragnisasi diri (self-organization) atau manajemen diri (self-management). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan. Pada aras ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsure selalu mencapai keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Proses kemandirian adalah suatu proses yang berjalan tanpa ujung.

Selanjutnya Taliziduhu Ndraha (1990) mengatakan, konsep masyarakat mandiri dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indicator, yaitu:

- 1) Kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
- 2) Kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari keadaan jatuh atau mundur sebagai akibat dari kekeliruan yang pernah ditempuhnya.
- 3) Kemampuan dari masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset, atau peralatan yang ada.
- 4) Keampuan masyarakat untuk memberi respons positif terhadap setiap perubahan social yang berlangsung.

2.1. Partisipasi.

Proses pembangunan yang dilakukan dengan model top-down, akan melemahkan semangat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita setuju bahwa dalam pembangunan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya (Batten, 1960 dalam Taliziduhu Ndraha, 1990). Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain.

Menurut Mubiyarto (1984) dalam Taliziduhu Ndraha (1990), Partisipasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Menurut Riza Primahendra (2003) meliputi:

- 1) Partisipasi atas nama (Token Partisipation): adalah partisipasi yang manipulatif di mana rakyat hanya “diatasnamakan “ melalui, misalnya, tokoh-tokoh formal atau pertemuan satu arah.
- 2) Partisipasi pasif (Passive Participation): merupakan bentuk partisipasi dimana rakyat dilibatkan sebagai massa, peserta, atau partisipan dari suatu kegiatan.
- 3) Partisipasi lewat konsultasi (Participation by consultation): bentuk partisipasi yang menjadikan rakyat sebagai subyek konsultasi dari ide kegiatan tertentu. Keputusan mengenai bentuk dan isi kegiatan dan bukan oleh rakyat tetapi pelaksana.
- 4) Partisipasi untuk insentif Material (Participation for Material Incentives): adalah partisipasi oleh rakyat karena ada insentif material tertentu yang disediakan.
- 5) Partisipasi Fungsional (Functional Participation): adalah partisipasi oleh rakyat didalam berbagai aspek suatu kegiatan, yang berbagai persyaratan dan kondisinya telah ditetapkan dalam suatu *framework* (kontrak)
- 6) Partisipasi Interaktif (Interactive Participation): merupakan bentuk partisipasi oleh rakyat dalam suatu kegiatan dalam berbagai aspek, sejak perencanaan sampai evaluasi, di mana ide kegiatan dimunculkan oleh pihak luar dan disediakan berbagai fasilitas yang diperlukan.
- 7) Mobilisasi Sendiri (Self Mobilization): bentuk partisipasi dimana rakyat mengambil inisiatif, melaksanakan kegiatan pada berbagai tahap secara sendiri, dan memobilisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan dari rakyat sendiri.

Untuk dapat melaksanakan partisipasi pembangunan masyarakat secara penuh, bahwa mobilisasi sendiri (Self Mobilization) menjadi bentuk partisipasi ideal yang perlu diwujudkan. Kemampuan memobilisasi sendiri dapat terwujud manakala telah berkembang kesadaran kritis dari masyarakat diikuti dengan semakin kuatnya kelembagaan yang mereka miliki.

Selanjutnya Borny memberikan batasan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Hampir sama dengan Borny, Theodorson memberikan batasan tentang partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto, 2003). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya.

Jika dilihat dari arti katanya, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Dari pengertian tersebut di atas partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam proses kegiatan”. Dari pengertian tersebut terlihat kata kunci dalam partisipasi adalah adanya kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat maupun melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan.

Dusseldrop dalam Mardikanto (2003) merinci lagi tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga dapat dikategorikan ke dalam beberapa beberapa jenjang yaitu:

- Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang timbul karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan dan keyakinannya sendiri.
- Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh dan dorongan) dari luar.
- Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya atau peranserta yang dilakukan untuk memenuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berpartisipasi akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
- Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian atau tidak memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang sudah diberlakukan.

Dari pemahaman ini jelas terlihat bahwa dalam partisipasi unsur yang dominan adalah adanya motivasi. Motivasi ini ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat yang erat hubungannya dengan adanya kebutuhan. Terdapat beberapa tingkatan kebutuhan manusia, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, tingkatan kebutuhan manusia digambarkan sebagai suatu piramida.



- Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang paling dasar dan merupakan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya.
- Kebutuhan keamanan adalah untuk mengatasi rasa ketidakpastian.
- Kebutuhan akan pengakuan merupakan kebutuhan akan rasa disayang dan menyayangi.
- Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan akan penghargaan, seperti kekuasaan, prestasi atau status.
- Perwujudan diri merupakan puncak dari semua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kemampuannya melaksanakan konsep dan gagasan menjadi suatu kenyataan.

Dari piramida kebutuhan Maslow tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan yang paling dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang mampu merasakan kebutuhan yang lebih tinggi tingkatnya, demikian juga sebaliknya.

BAB 3

Pendidikan Orang Dewasa

Pembangunan komunitas dilakukan oleh masyarakat dengan kesadaran kritis untuk mandiri, bukan pemaksaan atau bujukan, untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat maka pembangunan komunitas harus bermotif pendidikan.

Dijelaskan dalam tulisan Roem Topatimasang, dkk, (1990) proses pendidikan yang digunakan dalam pembangunan komunitas adalah pendidikan orang dewasa (adult education/andragogie) yang berkelanjutan. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni andra (= orang dewasa) dan agogos (=memimpin) selanjutnya andragogie dirumuskan sebagai “suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar.”

Pertimbangan yang mempengaruhi pendapat bahwa pendidikan adalah kegiatan yang berkelanjutan setelah masa kanak-kanak adalah:

- 1) Bahwa hidup itu sendiri adalah pengalaman pendidikan. Confusius pernah menekankan pentingnya arti belajar dari pengalaman ketika ia menyatakan: “Saya dengar dan saya lupa”; “Saya lihat dan saya ingat”; Saya lakukan dan saya paham”. Pernyataan itu berarti bahwa pemahaman dan pengetahuan secara langsung memang berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman keseharian.
- 2) Bahwa pendidikan itu sendiri adalah proses berulang tanpa henti untuk mengatasi berbagai konflik social. Masalah-masalah social yang kita hadapi saat ini, adalah jauh lebih banyak disbanding dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian terdapat kebutuhan yang lebih besar untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pendidikan ulang (re-education).
- 3) Bahwa proses belajar itu sendiri adalah pemahaman tentang bagaimana caranya belajar.

Disamping belajar dari pengalaman dan mengalami proses pendidikan ulang untuk mengatasi konflik-konflik social, maka kitapun harus memahami dan menguasai cara bagaimana proses belajar itu sendiri berlangsung.

Program guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah ditentukan bersama dengan indicator-indikator yang sudah disepakati, mempunyai dua manfaat: manfaat pertama adalah untuk mencapai tujuan program itu sendiri dan yang kedua adalah program sebagai proses belajar untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.

Proses belajar yang berlangsung dalam pelaksanaan program adalah proses pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan orang dewasa (*andragogie*), menurut Mardikanto (2003); Roem Topatimasang (1990) pendidikan orang dewasa meliputi:

- 1) Proses belajar mengajar yang berlangsung secara lateral/horizontal, sebagai proses belajar bersama yang partisipatif dimana semua yang terlibat saling sharing/bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman. Proses sharing pengalaman ini tidak hanya antar peserta saja tetapi juga dengan pendamping.
- 2) Kedudukan pendamping tidak berada diatas atau lebih tinggi disbanding dengan dengan anggota komunitas, melainkan dalam posisi sejajar.
- 3) Peran sebagai pendamping bukan sebagai guru yang harus menggurui anggota komunitas, melainkan sebatas sebagai fasilitator yang membantu proses belajar .
- 4) Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan, perlu memperhatikan karakteristik orang dewasa, yang pada umumnya telah mengalami “kemunduran” penglihatan, pendengran, dan daya tangkap/penalaran.
- 5) Materi penyuluhan, harus berangkat dari “kebutuhan yang dirasakan” terutama menyangkut:
 - Kegiatan yang sedang dan akan segera dilakukan
 - Masalah yang sedang dan akan dihadapi
 - Perubahan-perubahan yang diperlukan.
- 6) Tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan, sebaiknya juga harus disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat tentang waktu dan tempat yang biasa mereka gunakan untuk keperluan-keperluan serupa.
- 7) Keberhasilan proses belajar tidak diukur dari seberapa banyak terjadi “transfer of knowledge”, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh terjadi dialog (diskusi, sharing) antar peserta belajar.

Berlangsungnya dialog memiliki arti yang sangat penting, kaitanya dengan:

- Penggalan inovasi yang ditawarkan, baik yang ditawarkan dari “luar” maupun “*indigenous technology*” yang digali dari pengalaman atau warisan generasi tua.

- Peluang diterima dan keberhasilan inovasi yang ditawarkan.
- Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk untuk “merasa memiliki”, keharusan “turut mengamankan” segala keputusan yang telah disepakati (melaksanakan, monitoring, dll).

Selanjutnya dikatakan Russ Dilts dalam Roem Topatimasang (1990) pendidikan orang dewasa adalah membantu orang dewasa menstrukturkan pengalamannya sendiri dengan cara yang memungkinkan mereka dapat memahami secara gamblang sebab-sebab permasalahan yang mereka hadapi, serta mengetahui pilihan-pilihan kemungkinan yang terbuka bagi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab karena kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan adalah hakekat pendidikan itu sendiri.

Selanjutnya Russ Dilts mengatakan bahwa tujuan pendidikan orang dewasa yang sesungguhnya yaitu pembentukan kesadaran dan belajar atas kemauan sendiri (*self-direct learning*). Pendidikan juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kesadaran dalam penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sehingga akan meningkatkan kemampuan untuk membentuk jaringan dengan pihak luar, Bambang Ismawan (2000).

A. Prinsip-prinsip belajar untuk orang dewasa

1. Orang dewasa belajar dengan baik apabila dia secara penuh ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan.
2. Orang dewasa belajar dengan baik apabila menyangkut mana yang menarik bagi dia dan ada kaitan dengan kehidupannya sehari-hari.
3. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila apa yang ia pelajari bermanfaat dan praktis.
4. Dorongan semangat dan pengulangan yang terus menerus akan membantu seseorang belajar yang lebih baik.
5. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila ia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuannya, kemampuannya, dan ketrampilannya, dalam waktu yang cukup.
6. Proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lalu, dan daya pikir dari warga belajar.
7. Saling pengertian yang baik yang sesuai dengan cirri-ciri utama dari orang dewasa memebantu pencapaian tujuan dalam belajar.

B. Karakteristik warga belajar dewasa

1. Orang dewasa mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda
2. Orang dewasa yang miskin mempunyai tendensi, merasa bahwa dia tidak dapat menentukan kehidupan sendiri.
3. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran dari pada digurui.
4. Orang dewasa lebih memberi perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya.
5. Orang dewasa lebih suka dihargai dari pada diberi hukuman atau disalahkan.
6. Orang dewasa yang pernah mengalami putus sekolah, mempunyai kecenderungan untuk menilai lebih rendah terhadap kemampuan belajarnya.
7. Apayangbiasa dilakukandorangdewasa,menunjuktahappemahamannya.
8. Orang dewasa secara sengaja mengulang hal yang sama.
9. Orang dewasa suka diperlakukan dengan kesungguhan itikad yang baik, adil dan masuk akal.
10. Orang dewasa sudah belajar sejak kecil tentang cara mengatur hidupnya, oleh karena itu ia lebih suka melakukan sendiri sebanyak mungkin.
11. Orang dewasa menyenangi hal-hal yang praktis.
12. Orang dewasa membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat akrab dan menjalin hubungan dekat dengan teman baru.

C. Karakteristik pengajar orang dewasa

Seseorang pengajar untuk orang dewasa haruslah:

1. Menjadi anggota dari kelompok yang diajar,
2. Mampu menciptakan iklim untuk belajar-mengajar.
3. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa pengabdian dan idealisme untuk kerjanya.
4. Menirukan untuk orang lain.
5. Menyadari kelemahannya, tingkat keterbukaannya, kekuatannya dan tahu bahwa di antara kekuatan yang dimiliki dapat menjadi kelemahan pada situasi tertentu.
6. Dapat melihat permasalahan dan menentukannya pemecahannya
7. Peka dan mengerti perasaan orang lain, lewat pengamatan.

8. Mengetahui bagaimana meyakinkan dan memperlakukan orang.
9. Selalu optimis dan mempunyai itikad baik terhadap orang lain
10. Menyadari bahwa perannya bukan mengajar, tetapi menciptakan iklim untuk belajar.
11. Menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai segi negative dan positif.

Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan pembangunan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “better farming, better business, dan better living, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (sasaran) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi social, politik, dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya (SDC, 1995 dalam Mardikanto 2003)

Kartasmita (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.

Sumodiningkrat (1996) mengemukakan bahwa keberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intristik, seperti: kekeluargaan, kegotong royongan, dan kebhinekaan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kartasmita (1996) menyimpulkan bahwa, upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan,

serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi dan pasar.

1. Perkembangan konsep pemberdayaan

Menurut Chambers (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “people-centered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya para ahli dan praktisi untuk mencari pembangunan alternative yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate growth, gender equity, and intergenerational equity. Kartasmita (1996), menambahkan bahwa konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan, tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Kartasmita (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sumodiningkrat (1996) mengemukakan bahwa keberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intristik, seperti: kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebhinekaan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kartasmita (1996) menyimpulkan bahwa, upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi dan pasar.

3. Perkembangan konsep pemberdayaan

Menurut Chambers (1995) dalam Papilaya (2001), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “people-centered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya para ahli dan praktisi untuk mencari pembangunan alternative yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate growth, gender equity, and intergenerational equity. Kartasasmita (1996), menambahkan bahwa konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan, tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

B. Bias bias pemberdayaan

Program pemberdayaan masyarakat tani yang seringkali dirancang oleh pihak luar mungkin saja kelihatannya meyakinkan tetapi bisa saja menyesatkan, ataupun merugikan komunitas petani itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala /bias pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) sebagai berikut:

1. Bias pertama adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya. Dimensi material lebih penting dari pada dimensi kelembagaannya. Dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosialnya.
2. Bias kedua adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan dari tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi nyata dan kehidupan masyarakat.
3. Bias ketiga adalah pembangunan masyarakat banyak ditingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia, dan mengakibatkan semakin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

4. Bias keempat adalah adanya anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang disatu pihak terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan. Dilain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi local yang jika disempurnakan akan lebih efisien dan efektif untuk dimanfaatkan.
5. Bias kelima, adalah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif dan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga masyarakat dilapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat dan memberdayakannya, bahkan ada kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang tidak terlalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
6. Bias keenam adalah bahwa masyarakat dilapisan bawah tidak tau apa yang diperlukanya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan meskipun menyangkut diri mereka sendiri.
7. Bias ketujuh adalah petani miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian cara menanganinya harus dengan cara partenalistik seperti melakukan orang-orang bodoh dan malas dan bukan dengan memberikan kepercayaan.
8. Bias kedelapan adalah, anggapan bahwa sector pertanian dan pedesaan adalah sector tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang. Bermitra dengan petani dan usaha kecil disektor pertanian dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko yang tinggi. Anggapan ini mengakibatkan prasangka dan hambatan upaya membangun pertanian dan usaha kecil pedesaan.

C. Perspektif pemberdayaan

Menurut Jim Ife (1995) dalam Papilaya (2001) dalam membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas pisahkan dengan dua konsep sentral, yaitu konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged (“ketimpangan”). Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang

beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya system (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing didalam peraturan (*how to compete within the rules*).

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitist adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan control yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan public, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan structural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan structural secara fundamental, menentang penindasan structural.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari pespektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu usaha aksi.

Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh ketiadaan daya (*powerless*) perlu ditemu kenali. Jim Ife (1955) dalam Papilaya (2001), mengidentifikasi beberapa jenis daya yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, antara lain:

1. Power terhadap pilihan pribadi, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. Power terhadap pendefinisian kebutuhan, yaitu mendampingi masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.

3. Power terhadap kebebasan berekspresi, yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya public.
4. Power terhadap institusi, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, system kesejahteraan social, struktur pemerintah, media dan sebagainya.
5. Power terhadap sumberdaya, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan control terhadap aktifitas ekonomi.
6. Power terhadap kebebasan reproduksi yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

1. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti memanfaatkan secara optimal berbagai kemampuan, nilai atau norma serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat termasuk juga menumbuhkan kembangkan daya usaha kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sendiri (Zakaria, 2008). maka dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dua aspek: (1) pemberian kekuasaan dan (2) pengembangan kapasitas.

Menurut Mardikanto (2010) mengusulkan adanya 4 (empat) bina yaitu: (1) bina sumberdaya manusia, (2) bina usaha, (3) bina kelembagaan dan (4) bina lingkungan yang dapat dimaknai sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat.

(1) Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha merupakan upaya dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, ketrampilan untuk dapat meningkatkan kualitas pribadi dan usahanya dalam meningkatkan mutu produktivitas selama melaksanakan pekerjaannya (Mardikanto, 2010). Dalam pengembangan kapasitas usaha, maka secara langsung akan terkait dengan jejaring kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak (Mardikanto, 2010). Menurut Wanandi (1993) dalam pengembangan kapasitas usaha, diperlukan adanya institusi-institusi usaha baru yang digalang bersama-sama. Kunci untuk menyelesaikan masalah kualitas sumber daya manusia adalah perlunya diciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan diri manusia.

Dalam hal ini, maka campur tangan pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif sangat diperlukan (Wanandi, 1993). Namun demikian, campur tangan tersebut tidak sampai menimbulkan penindasan struktural atau wacana baru dan perlu memperhatikan keanekaragaman

(2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Mardikanto (2010) memaknai institusi sebagai perangkat umum yang ditaati atau disepakati dan dipelihara oleh anggota masyarakatnya. Oleh karenanya, apapun bentuknya yang disebut kelembagaan perlu didukung oleh komponen: (1) keterlibatan orang di dalamnya, (2) kesepakatan atau kepentingan yang akan diraih, (3) aturan main yang ditaati dan (4) struktur yang jelas (Mardikanto, 2010). Dalam hal ini, pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi: (1) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, (2) kejelasan strategi yang akan ditempuh, (3) interaksi antar individu, (4) interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal (Mardikanto, 2010).

Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) peningkatan daya adaptasi, (2) peningkatan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, (3) pemberdayaan sumber daya manusia, (4) kejelasan aturan main di kelembagaan petani, (5) pengembangan kemitraan usaha, (6) peningkatan daya saing produk lokal (*market local leader*) di tingkat lokal, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing lokal dan (7) berpihak kepada petani (Zakaria, 2006).

Makna lain dalam pengembangan kapasitas kelembagaan adalah berfungsinya: (1) unit belajar, (2) unit bekerja sama dan (3) unit produksi dan kerjasama kemitraan. Untuk mendorong peningkatan ke tiga fungsi tersebut, menurut Sutrisno (2010) peran pemerintah dalam penciptaan suasana yang dapat mendukung terjadinya partisipasi dan munculnya inisiatif dari masing-masing kelembagaan petani tetap sangat diperlukan.

(3) Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pengembangan kapasitas lingkungan, merupakan kegiatan yang berujung pada penguatan dukungan dari pihak luar (*stake holder*) dalam berperan untuk pencapaian tujuan kelembagaan ekonomi petani. Sedangkan menurut Zakaria (2008), Pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani ditempuh melalui (a) Pengembangan sumberdaya manusia, (b) Pengembangan kelembagaan (aturan main). (c) rekayasa teknologi, dan (d) perbaikan lingkungan social dan ekonomi.

Pengembangan sumberdaya manusia dapat ditempuh melalui: pelatihan manajemen organisasi dan usaha ekonomi produktif, kursus dan magang. Pengembangan kelembagaan organisasi ditempuh melalui: (1) revitalisasi aturan main organisasi, (2) penyempurnaan struktur dan fungsi organisasi, dan (3) penegakan main serta menjalin kemitraan usaha. Pengembangan

teknologi pertanian organik ditempuh melalui: (1)penyediaan peralatan, (2) sarana prasarana produksi, (3) penyusunan tahapan prosedur operasional, (4) pemilihan dan penerapan tehnologi pertanian organik yang tepat, (5) penyediaan perangkat pembukuan usaha dan formulir serta kelengkapan administrasi organisasi yang disertai dengan pendampingan teknis.

Untuk melakukan kegiatan tersebut tentunya kelembagaan ekonomi petani perlu adanya dukukungan dari pihak luar. Pada fase awal peran perguruan tinggi dan LSM serta pemerhati pertanian organik sangat diperlukan pada aspek pendampingan dan peran pemerintah pada aspek pendanaan cukup besar. Pada tahap awal peran dunia usaha dibutuhkan tapi masih relative kecil. Setelah kelembagaan ekonomi petani berdaya yakni mampu menjalankan fungsi organisasi dan ICS bisa berfungsi secara efektif dan efisien maka tahap selanjutnya adalah pengembangan jaring kemitraan bisnis. Kemitraan berarti kerjasama dengan memanfaatkan kelebihan atau kemampuan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama. (Zakaria, 2008).

2. Strategi Pemberdayaan

Dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi oleh strategi kerja yang tepat demi keberhasilannya mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi oleh strategi Strategi juga diartikan sebagai hasil analisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Heene, dkk. 2010).

Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. (Mardikanto, 2013). Pada kegiatan pemberdayaan secara umum petani dipandang sebagai pelaku utama. Hal ini dikarenakan gambaran masyarakat tentang petani yang selalu lekat dengan kemiskinan, pendidikan rendah dan sebagai objek dari berbagai program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemberdayaan yang tepat sehingga dapat melepaskan petani dari kemiskinan gambaran tersebut.

Dalam melakukan pemberdayaan pembangunan pertanian, prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) Belajar dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus merupakan proses yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Masyarakat tani harus diperankan sebagai pelaku utama, sedangkan penyuluh sebagai fasilitator, bukan sebagai guru.

- (3) Belajar bersama dengan tukar pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat harus diakui, sedangkan pengetahuan dari luar atau inovasi harus dipilih secara arif dan diharapkan dapat menutupi atau melengkapi kelemahan pengetahuan.
- (4) Mendahulukan kepentingan masyarakat setempat, dimana para pendamping atau fasilitator harus berdialog dengan masyarakat setempat yang kadangkala kurang memahami secara mendalam apa kebutuhan prioritas yang mendasar dalam kehidupannya dan membesarkan harapannya agar timbul kepercayaan diri dalam melaksanakan kegiatannya.
- (5) Membangkitkan kepercayaan diri. Para pendamping/fasilitator harus mampu membantu mengidentifikasi nilai-nilai positif dari kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tradisional. Agar mereka memiliki kepercayaan diri dalam melibatkan diri atau berperan dalam suatu program pembangunan.
- (6) Berorientasi pada proses. Para pendamping/fasilitator tidak lagi berorientasi pada target, tapi pada proses meskipun membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan serta evaluasi program.

Strategi pemberdayaan masyarakat tani, Sumodiningkrat (dalam Mardikanto, 2013), pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu sebagai berikut: (1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; (2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; (3) Modernisasi melalui penajamn arah perubahan struktur sosial ekonomi, kesehatan, budaya dan politik yang bersumber dari partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka strategi pemberdayaan petani kedepan minimal dapat dilakukan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia manusia masyarakat pertanian dan pengembangan kelembagaan petani. Menurut Zakaria (2008), pengembangan kelembagaan ekonomi petani dapat dicapai melalui strategi: (1) pemberdayaan organisasi atau kelembagaan, (2) pengembangan jarring kemitraan bisnis dan (3) peningkatan daya saing. Strategi itu dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sesuai tingkat keragaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan petani padi organik dengan ICS merupakan strategi untuk menghasilkan (1) aspek tehnologi yaitu produk unggulan padi organic sesuai standar SNI merupakan komodite yang dibutuhkan pasar dan mempunyai daya saing. (2) aspek manajemen, yaitu melatih organisasi untuk memperbaiki manajemen organisasi dan memperbaiki administrasi baik ditingkat pengelola manajemen maupun ditingkat petani.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

1.1 Peranan LSM

Dalam peningkatan keswadayaan masyarakat untuk melakukan pembangunan terhadap dirinya sendiri tentunya perlu adanya pendamping yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.

Menurut Bambang Ismawan (2000), dalam keseluruhan proses penguatan peran masyarakat, peranan LSM menjadi penting karena mampu menjangkau masyarakat maupun pengambil keputusan di pemerintah. Dengan kata lain LSM mampu menggerakkan pembangunan dari bawah ke atas. LSM mampu menerjemahkan dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bawah.

a. Pengembangan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan merupakan komponen yang strategis dalam upaya pengembangan masyarakat. Berbagai upaya yang pernah dilakukan tanpa mempertimbangkan dan memanfaatkan kelembagaan rakyat pada umumnya mengalami kegagalan.

Menurut Riza Primahendra (2003), ada dua alasan mengapa kelembagaan masyarakat sangat penting: (1). Bagi orang miskin, mengatasi kemiskinan secara sendirian hampir tidak mungkin. (2). Dalam kebersamaan terjadi proses penyatuan potensi dan saling memperkuat yang sering disebut juga sebagai proses saling asah-asih-asuh. Dalam proses ini berbagai keterbatasan masyarakat miskin disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih besar.

Model pengorganisasian masyarakat, menurut Rothman dan Tropman dalam Paulus Wirutomo (2003), membaginya kedalam tiga model:

1. Model pembangunan masyarakat local. Model ini mendasarkan tehnik consensus dan asumsi bahwa dalam masyarakat terjadi kesenjangan relasi

dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis. Oleh karenanya, tujuan dari pendekatan ini adalah mengembangkan kemandirian, mengembangkan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dititik beratkan pada proses. Strategi perubahannya dilakukan melalui pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.

2. Model Perencanaan Sosial. Model yang mendasarkan pada perubahan konflik dan konsensus ini berangkat dari asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat masalah social yang krusial, seperti kesehatan fisik dan mental, perumahan dan reaksional. Mendasarkan kepada asumsi tersebut, tujuan yang ingin dicapai pendekatan ini adalah pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah penting yang ada dalam masyarakat.
3. Model Aksi Social, Model yang mendasarkan pada karakteristik taktik konflik dan konfrontasi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi proses ketidak berdayaan secara sistematis (systematic disempowerment people), berupa pamarjinalisasian, kesenjangan social, perampasan hak dan ketidakadilan.

Strategi yang dikembangkan adalah kristalisasi isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi musuh mereka. Implementasi ketiga model ini tergantung pada persepektif pelaku program dalam menganalisis kondisi. Analisis yang berkiblat pada perspektif structural fungsioanal akan memilih pendekatan pertama, sementara yang mendasarkan pada analisis konflik akan menggunakan pendekatan ketiga.

BAB 6

PRA (Participatory Rural Appraisal)

1. Latar belakang penggunaan PRA

Mansour fakih (1996) mengatakan bahwa, konsep pembangunan yang dominan, yang diterapkan di kebanyakan negara dunia ketiga, mencerminkan paradigma pembangunan model barat, dalam konsep ini pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”. Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Konsep pembangunan ini memiliki akar sejarah dan intelektual pada periode perubahan social yang berkaitan dengan revolusi industri. Bagi sebagian besar dunia ketiga pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi, yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara yang lainnya. Dari perpektif ini, peran pemerintah menjadi subyek Pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai obyek, resipien atau penerima, klien atau bahkan partisipan pembangunan.

Pengalaman setelah beberapa decade pelaksanaan konsep pembangunan tersebut menunjukkan penduduk miskin tetap miskin, jurang antara si-miskin dengan si-kaya semakin lebar dan dalam. Seperti yang di ungkapkan oleh Mansour Fakih (2000), Salah satu dampak Pembangunan/Modernisasi yang paling dramatis di Dunia Ketiga dapat dilihat dalam kasus Revolusi Hijau (Green Revolution).

Sepanjang program Revolusi Hijau, empat puluh abad pengetahuan pertanian rakyat Dunia Ketiga mulai disingkirkan dan dimusnahkan. Revolusi Hijau, sebagai bentuk Pembangunan dan Modernisasi pertanian yang dirancang oleh perusahaan multinasional dan patriaki Barat, menghomogenkan keberagaman alam dan keberagaman pengetahuan manusia mejadi pola pertanian reduksionis (Shiva, 1989, dalam Mansour Fakih, 2000).

Akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran dalam paradigma pembangunan masyarakat menjadi pembangunan bersama masyarakat, pendekatan dari atas menjadi bergeser menjadi pendekatan dari bawah, dari standarisasi terpusat berubah menjadi penganeekaragaman local, dan dari “Blue print” menjadi proses belajar.

Proses pembangunan masa lampau dilakukan dengan model top-down, akan melemahkan semangat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita setuju bahwa dalam pembangunan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya (Batten, 1960 dalam Taliziduhu Ndraha, 1990). Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain.

Dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan, Ini berbagai pendekatan telah dilaksanakan. Salah satu diantaranya adalah dengan pendekatan

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Pengkajian atau pemahaman situasi Pedesaan secara Partisipatif.

Keberhasilan dalam program pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan, salah satu metode yang sering digunakan dalam perencanaan adalah metodologi PRA (Participatory Rural Appraisal).

Menurut Robert Chambers sebagai orang yang mengembangkan Metode PRA, menyatakan bahwa PRA merupakan metode dan pendekatan pembelajaran mengenai kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, oleh masyarakat pedesaan sendiri. Dengan catatan:

- Pengertian belajar ini meluas, meliputi kegiatan menganalisis, merencanakan dan bertindak.
- PRA lebih cocok disebut metode-metode atau pendekatan pendekatan (jamak) dari pada metode atau pendekatan (tunggal)
- PRA memiliki metode-metode dan tehnik-tehnik yang bisa kita pilih. Sifatnya selalu terbuka untuk menerima cara-cara dan metode baru yang dianggap cocok.

PRA merupakan sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara, 1996).

PRA juga dapat diartikan:

1. Tehnik riset yang dikembangkan oleh para peneliti pembangunan internasional pada akhir 1970 an dan awal 1980 an sebagai alternatif dan pelengkap dari survei contoh yang konvensional
2. Sebuah cara belajar dari, dan dengan anggota masyarakat untuk menyelidiki, menganalisa dan menilai kesempatan dan keterbatasan, dan membuat keputusan-keputusan yang tepat waktu dan diberitahukan, sehubungan daengan proyek-proyek pembangunan
3. Suatu metode dimana sebuah team riset (Pemahaman) lintas sektoral yang menyertakan anggota masyarakat dapat secara cepat dan sistematis mengumpulkan keterangan mengenai
 - Penilaian kebutuhan
 - Study kelayakan
 - Menentukan prioritas dalam aktivitas pembangunan
 - Memonitor dan mengevaluasi aktivitas pembangunan

2. Pemahaman konsep dasar PRA

Dijelaskan oleh Robert Chambers (1992); Adinda Van Hemelrijk (2002); KPDTNT (1996) PRA merupakan suatu pendekatan dan metode yang berkembang yang membuat masyarakat local mampu membagi, meningkatkan dan menganalisa pengetahuan tentang kehidupan dan kondisinya, membuat rencana dan bertindak.

Berarti menyerahkan tongkat kepada orang dalam” dalam metode dan aksi. Perang orang luar adalah sebagai “katalisator”; fasilitator proses di komunitas yang siap melakukan perubahan situasi.

PRA mengandung dua dimensi, yakni dimensi perilaku dan dimensi tehnik. Yang utama adalah perilaku, baru kemudian tehnik. Tehnik tergantung pada perilaku, perilaku yang tepat menjamin penggunaan tehnik akkurat.

Perilaku dalam PRA mempertemukan dua perilaku, yakni Perilaku orang luar (Peneliti, kader pembangunan, staf LSM dsb,) bertemu dengan perilaku orang dalam (warga masyarakat setempat, petani, buruh perempuan, nelayan, remaja, dsb), untuk suksesnya pelaksanaan PRA ada sejumlah persyaratan perilaku yang seyogyanya dipenuhi, baik orang dalam maupun orang luar. Pengalaman menunjukkan tepat tidaknya perilaku orang luar sangat berpengaruh terhadap kualitas kerjasama yang diberikan oleh orang dalam, dengan demikian berpengaruh pula pada tingkat keberhasilan PRA. Tepat perilaku dari orang

luar, akan mengakibatkan positif perilaku orang dalam, dengan demikian menjadi mulus kerjasama antara orang luar dan orang dalam, dan lebih lanjut terbuka kesempatan bagi kesuksesan Pelaksanaan PRA.

3. Dimensi Perilaku dari PRA

Kerjasama mensyaratkan adanya kesetaraan. Demikian pula kerjasama antara orang luar dan orang dalam, dalam rangka pelaksanaan PRA memerlukan terciptanya posisi setara antara orang luar dan orang dalam. Persoalannya adalah bahwa senantiasa terjadi orang luar merasa (atau mempersepsikan dirinya seolah-olah) lebih tinggi, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih hebat, dan lebih yang lainnya. Sebaliknya sering menganggap orang dalam lebih bodoh, kurang pengalaman, kurang sadar, kurang pengetahuan dan berbagai kekurangan yang lain.

Perasaan anggapan atau persepsi demikian itulah yang cenderung mendorong lahirnya sikap dan perilaku orang luar untuk harus memberi petunjuk, memberi pengarah, membina, menggurui, mengawasi dll, kepada orang dalam. Dengan demikian pola hubungan antara orang luar dengan orang dalam menjadi hubungan antara atasan dan bawahan, guru-murid, jaksa-pesakitan, dst, suatu pola hubungan yang harus ditolak dalam kerangka PRA.

Dengan demikian perlu adanya kesediaan dari orang luar untuk menyadari bahwa walaupun mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Begitu pula orang dalam selain mempunyai kekurangan juga banyak kelebihan-kelebihan yang dipunyai. Dengan menyadari kesetaraan kualitas antara orang luar dan orang dalam tersebut, masing-masing mengakui memiliki kelebihan dan kekurangan, dan menerimanya secara jujur dan ikhlas maka sebenarnya telah terciptanya suatu syarat yang penting bagi tumbuhnya kerjasama antara orang luar dan orang dalam.

4. Tujuan PRA

a. Tujuan Praktis

Tujuan dari pelaksanaan PRA adalah terjadinya aksi ditingkat masyarakat (orang dalam). Hal ini berbeda dengan penelitian pada umumnya yang biasanya bertujuan untuk menguji Hipotesis atau untuk mengembangkan teori. Kalau untuk mengembangkan teori diperlukan generalisasi, maka untuk aksi atau kegiatan ditingkat masyarakat diperlukan rencana atau program. Berbeda dengan program yang biasanya dibikin oleh orang luar dan dilegitimasi orang dalam maka program yang dihasilkan PRA dibuat oleh orang dalam yang difasilitasi dalam kerjasamanya dengan orang luar. Seperti halnya dengan program yang lain program PRA juga memerlukan data. PRA memerlukan data,

baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Data dihimpun dan dianalisis oleh orang dalam (bekerjasama dengan orang luar).

Data yang dikumpulkan haruslah data yang benar, karena itu perlu senantiasa di cek didalam PRA cara mengecek kebenaran atau tingkat kepercayaan dan akurasi data (realibilitas dan validitas) tersebut di namakan Triangulasi. Yang meliputi:

- Komposisi tim: lintas sektoral, termasuk pria dan wanita, orang dalam (anggota masyarakat) dan orang luar (bukan dari anggota masyarakat)
 - Sumber data: bermacam-macam sumber data (kelompok masyarakat, tempat, peristiwa dan proses)
 - Instrumen: campuran dari tehnik dan peralatan

Kalau dicermati, maka akan tercatat bahwa keterlibatan orang dalam (masyarakat) dalam kegiatan PRA secara berturut-turut berada pada:

- Menentukan simbol-simbol yang akan digunakan didalam instrumen.
- Mengumpulkan data dan informasi .
- Menganalisis data.
- Menyusun program dan,Melaksanakan program

b. Tujuan Strategis:

1. Menukar balik peran: anggota masyarakat menjadi subyek dalam pembangunan, orang luar sebagai fasilitator proses.
2. Kapasitas peserta ditingkatkan melalui aksi bersama: (a). anggota masyarakat belajar menganalisa situasi mereka sendiri, membuat desain dan melaksanakan kegiatan pembangunan., (b). Kegiatan pembangunan dari luar merubah sikap dan perilaku mereka melalui interaksi dengan masyarakat.

5. Prinsip-prinsip PRA:

- 1) Belajar dari masyarakat, Kegiatan PRA:
 - Mengacu pada kepentingan masyarakat
 - Mengakui nilai pengetahuan tradisional
 - Mengakui kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah mereka sendiri
- 2) Membicarakan dan Membagi pengalaman, Orang luar dan orang dalam:
 - Membagi pengetahuan dan pengalaman mereka
 - Menganalisa masalah dari berbagai perspektif untuk mencari solusi baru

- 3) Melibatkan Semua Kelompok di Komunitas
 - Suatu komunitas tidak homogen (ada perbedaan kelas, kelompok etnis, agama, gender)
 - Pemimpin formal, tokoh masyarakat atau kelompok tertentu tidak mewakili komunitas secara keseluruhan.
- 4) “Orang Luar” sebagai fasilitator
 - Orang luar membantu masyarakat menganalisa situasi mereka sendiri
 - Fasilitator luar tidak berceramah, menggurui dan mendominasi kegiatan
 - Peran fasilitator luar menurun perlahan.
- 5) Orientasi praktis
 - Investasi Masalah dan Potensi
 - Meneliti solusi alternatif terhadap masalah
 - Mendesain program bersama dengan penekanan pada kemandirian komunitas.
- 6) Trianggulasi:
 - Komposisi tim: (a). Multi disiplin, (b). Orang dalam dan orang luar, (c). Laki-laki dan perempuan.
 - Sumber-sumber informasi: (a). Peristiwa dan proses (b). Berbagai individu/orang (c). Berbagai tempat.
 - Metode dan Teknik: (a). Wawancara dan diskusi, (b). Diagram, (c). Pengamatan.
- 7) Mengoptimalkan Hasil

Exploitatif: Untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui dengan mempersempit cakupan dan memperdalam analisa. Mengatasi keterbatasan: (Waktu, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial) melalui:

 - Optimal Ignorance
 - Appropriate Imprecision
- 8) Belajar Dari Kesalahan:

PRA bukan alat yang sempurna; sebaliknya:

 - Menerima kesalahan sebagai sesuatu yang biasa
 - Menggunakan dan mengembangkan teknik di lapangan

- 9) PRA Merupakan Proses yang berlanjut:
- Analisis masalah dan potensi berlanjut karena:
 - Prioritas dan masalah suatu komunitas berubah dari waktu ke waktu
 - Kegiatan dan Program komunitas perlu disesuaikan dengan perubahan yang muncul.

6. Pembentukan Tim PRA.

a. Proporsi tim.

Pembentukan tim pemandu sepatutnya mewakili berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda serta saling melengkapi . Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- Latar belakang anggota tim yang beragam, berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan, umur, jenis kelamin, pengelompokan sosial dan ekonomi dsb. Dengan demikian akan diperoleh berbagai sudut pandang pemahaman yang lebih menyeluruh dari berbagai aspek
- Proporsi antara orang luar dan orang dalam yang seimbang .Jika kebanyakan anggotanya orang luar maka akan berpengaruh kurang baik pada interaksi dalam Tim dan proses pelaksanaan PRA karena akan ada kecenderungan orang luar untuk mendominasi dan berdiskusi diantara mereka sendiri . Disamping itu jika orang luar memasuki sebuah desa dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan mungkin akan menghambat partisipasi masyarakat karena itu harus dapat dipastikan bahwa peserta dari desa terdiri dari paling sedikit sama dengan jumlah pendatang .
- Komposisi dari wakil-wakil masyarakat harus diupayakan berimbang antara berbagai golongan seperti laki-laki dan perempuan, wakil kelompok tua dan muda, pemilik tanah dan pengarap dsb. Harapannya adalah bahwa unsur-unsur ini dipadukan sedemikian rupa menurut komposisi yang berimbang agar diperoleh sebuah tim yang handal .

b. Penyamaan pandangan anggota-anggota tim

Salah satu langkah penting dalam pembentukan tim ini adalah penyamaan pandangan antara anggota-anggotanya. Langkah ini sangat diperlukan untuk membangun keutuhan tim terutama jika dalam tim tersebut terdapat anggota baru yang belum berpengalaman atau belum mengenal wilayah dan program yang bersangkutan . Penyamaan

pandangan ini dilakukan dengan meninjau dan menjelaskan kembali berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, seperti aspek-aspek yang menyangkut pelaksanaan PRA itu sendiri, gambaran wilayah dan peserta program dan proses pelaksanaannya, dsb .

Jika perlu dapat dilakukan penyegaran kembali terhadap penggunaan tehnik-tehnik yang akan dipergunakan . Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kegiatan ini membutuhkan waktu dan pikiran yang cukup banyak . Sehingga sebaiknya disediakan waktu yang lebih longgar untuk beberapa pekerjaan tertentu, seperti, pembuatan kurikulum, pembekalan bagi anggota yang belum memahami benar metode PRA, atau untuk pembahasan lainnya.

c. Pemberian tugas tim

Tugas-tugas utama harus diselenggarakan oleh tim adalah;

- Memfasilitasi perumusan tujuan dan rencana kegiatan PRA yang akan dilaksanakan.
- Memandu dan memfasilitasi arah dan pelaksanaan kegiatan PRA tersebut sesuai tujuan penerapannya.
- Mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut .
- Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan PRA yang telah dilakukan .

Untuk melakukan semua tugas itu tentu perlu diadakan pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok . Tugas-tugasnya antara lain:

- Pemandu tugasnya adalah membangun proses dalam memfasilitasi penggalian informasi, membantu menganalisa dan mencatat poin-poin penting secara garis besar selama proses berlangsung . Tugas utama pemandu sebenarnya adalah mendorong masyarakat peserta kegiatan untuk berdiskusi diantara mereka sendiri .
- Pemerhati proses tugasnya adalah mendampingi dan membantu pemandu dalam memperlancar kegiatan, serta menjaga proses agar sampai ketujuan. Apabila terjadi hal-hal yang kurang atau tidak terarah tugasnya untuk memperingatkan pemandu dengan cara yang tidak mencolok .
- Pemerhati peserta tugasnya adalah mengamati masyarakat peserta kegiatan, mencoba melibatkan peserta yang pasif dan mengatasi peserta yang terlalu mendominasi pembicaraan dengan cara yang halus biasanya untuk memberi pengertian kepada peserta yang reaktif caranya adalah mengajaknya keluar dan berdialog secara terbuka.

- Pencatat tugasnya adalah melakukan dokumentasi proses dan hasil secara lengkap .
- Penerjemah tugasnya sangat penting yaitu membantu anggota tim yang tidak menguasai bahasa daerah yang bercangkutan .

d. Pemanfaatan Data Sekunder

Data sekunder digali untuk memperoleh gambaran awal yang masih kasar mengenai suatu desa/wilayah, tim dapat memulai menggali informasi dari data-data sekunder, data yang diperoleh tidak langsung dari lapang. Beberapa pihak menangkap kesan bahwa pengkajian data sekubnder lebih merupakan kepentingan “orang luar”. Barangkali anggapan ini ada benarnya, namun “orang dalam” pun dapat mempelajari banyak hal yang bernanfaat tentang diri dan lingkungannya sendiri dari data sekunder ini. Hal lain yang sering dipertanyakan adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan data sekunder yang seringkali cukup canggih. Hal ini memang merupakan suatu masalah yang nampaknya perlu dipecahkan dari 2 segi:

- ❑ Pertama: agar data sekunder yang dihasilkan bermanfaat, maka informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat yang berkepentingan dalam bentuk yang dapat dipahami dalam pelaksanaan kegiatan PRA, tim PRA, membantu masyarakat untuk memahami dan mengkaji data sekunder dengan menyederhanakan dan memvisualisasikan kedalam bentuk yang dapat dipahami bersama.
- ❑ Kedua: yakni dari segi masyarakat sendiri, diharapkan bahwa dikemudian hari mereka berkembang kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber data sekunder dari sumber-sumber di luar desanya.



Gambar: Pemanfaatan Data Sekunder

7. Persiapan Lapang

Persiapan lapang merupakan hal yang penting dalam PRA karena itu perlu dilaksanakan sebaik-baiknya. Untuk keperluan itu salah seorang anggota atau pimpinan tim PRA menyampaikan dan mendiskusikan rencana pelaksanaan PRA kepada aparat desa, pimpinan dan warga masyarakat setempat. Yang perlu disampaikan dan didiskusikan adalah:

1. Tujuan
2. Waktu Pelaksanaan (kapan dan berapa lama)
3. Berapa orang luar yang akan terlibat dan siapa saja mereka
4. Warga masyarakat mana yang diharapkan terlibat dan berapa jumlahnya
5. Berapa orang luar yang menginap, berapa lama, dan syarat lain yang perlu
6. Masalah konsumsi selama pelaksanaan PRA, dan sebagainya

8. Penyusunan Rencana

Rencana kegiatan disusun oleh tim PRA (termasuk wakil masyarakat setempat) dan merupakan acuan bagi pelaksanaan PRA di desa. Rencana kegiatan pada umumnya berisi

1. Tujuan
2. Penentuan instrumen
3. Pembagian tugas
4. Jadwal

9. Sosialisasi

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah proses atau upaya awal dari tim PRA agar dapat diterima oleh masyarakat setempat sebagai mitra.

Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan beranjangsana dari rumah ke rumah anggota masyarakat setempat. Selama anjangsana anggota tim PRA harus rela melepaskan atribut termasuk pakaian dinas. Ia datang untuk silaturahmi sebagai sahabat. Menurut pengalaman warga masyarakat akan menerima anggota tim dengan tangan terbuka dan suka cita

Peristiwa sederhana ini mengandung banyak makna antara lain:

1. Nyata sekali bahwa untuk ketrampilan tertentu warga setempat lebih unggul daripada tim

2. Proses ini hendaknya menyadarkan kedua belah pihak, yakni bagi anggota tim, dapat menghargai warga setempat, bagi warga setempat dapat merasa berharga menambah percaya diri
3. Mulai terbangun proses belajar, terbina kesetaraan dan menghapus kecurigaan

10. Menciptakan suasana belajar bersama

Menyelenggarakan PRA pada dasarnya adalah menyelenggarakan untuk penyadaran baik untuk tim PRA maupun bagi warga masyarakat.

Kecuali itu menyelenggarakan PRA berarti pula upaya mengumpulkan dan menganalisis data informasi bagi penyusunan program kegiatan.

Proses belajar bersama akan berlangsung pada saat kapan saja ada pertemuan langsung antara tim dan anggota masyarakat.

Forum belajar bersama dapat bersifat individual, yakni ketika wawancara mendalam semi terstruktur atau ketika transek namun sebagian besar bersifat kelompok. Forum belajar paling efektif menurut pengalaman minimal 5 –20 orang.

12. Kapan menggunakan PRA:

Penggunaan PRA dalam berbagai tahap proses pembangunan, implikasi untuk konteks lembaga dan penyediaan sumberdaya:

1. Penerapan PRA dalam proses pembangunan

Metode ini dapat digunakan dalam semua tahap dari proses pembangunan

Dalam tahap identifikasi:

- Untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat mengenai masalah yang dirasakan oleh orang lain
- Untuk memperoleh pandangan secara bersama mengenai masalah dan kebutuhan yang dirasakan
- Untuk eksploirasi atau pendalaman topik tertentu yang diidentifikasi sebagai isu
- Untuk identifikasi kepentingan yang bertentangan antar kelompok

Dalam tahap desain:

- tuk menentukan prioritas untuk kegiatan pembangunan
- Untuk menyediakan informasi yang lebih rinci tentang kelayakan kegiatan-kegiatan yang Un direncanakan secar tentative

Dalam tahap pelaksanaan:

- Untuk mentukan kegiatan-kegiatan dan pelaku-pelaku yang relevan (perencanaan mikro)

- Untuk monitoring dan evaluasi kegiatan proyek
- Untuk menjawab konflik antar berbagai kelompok kepentingan

2. Implikasi untuk konteks organisasi:

Perolehan data melalui PRA, seperti proses pengumpulan informasi yang lain, dapat dilakukan oleh banyak organisasi-akademik atau pelaksana program yang mempunyai satu tim yang terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam metode ini.

3. Sumberdaya yang dibutuhkan;

Pada tingkat Lembaga:

Lembaga pelaksana harus mempunyai anggaran terbuka, otonomi, fleksibilitas dalam mengambil keputusan dan alokasi anggaran.

Sumber daya manusia:

Sumber daya yang memfasilitasi proses PRA, syarat terpenting adalah suatu tim yang terdiri dari orang-orang yang terlatih dengan baik dengan pengalaman lapangan dan tingkat komitmen yang tinggi.

Fasilitator yang baik harus mempunyai modal social yang tinggi, menurut Ancok (2003) sifat pribadi yang menumbuhkan modal social antara lain:

- 1) Mentalitas berkelimpahan (abundance mentality)
- 2) Pikiran positif pada orang lain
- 3) Kemampuan berempati
- 4) Komunikasi transformasional
- 5) Berorientasi sama-sama puas
- 6) Sifat Melayani (serving attitude)

Sumberdaya material:

Alat dan bahan yang digunakan merupakan bahan yang mudah dikenal oleh komunitas dan mampu meningkatkan kreativitas, bukan merupakan alat yang menjadikan jarak dengan masyarakat local menjadi jauh.

11. Beberapa Metode dasar untuk PRA:

Banyak metode telah dikembangkan dan digunakan dalam PRA untuk memahami suatu situasi, desa atau lembaga. Salah satu ciri-ciri yang menonjol dari metode tersebut adalah penekanan pada visualisasi dan penyederhanaan. Atribut ini membuat metode ini mudah untuk digunakan dan dipahami, dan meningkatkan potensi partisipasi local.

- 1). Review dan analisis data skunder
- 2). Interaksi dengan sumber informasi kunci, mode kerjakan sendiri (*do-it-yourself-mode*) menukar balik peran orang dalam dan orang luar.
- 3). Wawancara semi-terstruktur (*Swemi-structured interviews/SSI*)
- 4). Interaksi dengan kelompok, metode dinamika kelompok.
- 5). Diskusi kelompok/sumbang saran/ melaksanakan lokakarya.
- 6). Diskusi kelompok terfokus (FGD)
- 7). Pertemuan Desa atau Wilayah

12. Tehnik-tehnik PRA

a. Mapping (pemetaan partisipatif)

Penduduk desa biasanya merasa senang dan tertarik menggambar peta desanya sendiri peta yang digambar bersama-sama banyak penduduk desa, menggambarkan dengan baik kumpulan pengetahuan lokal mereka yang memungkinkan kita untuk menyelidiki pola pemanfaatan tanah, jenis pengelolaan SDA, yang dilakukan oleh penduduk desa dengan masalah dan prospeknya . Sebagai sebuah alat komunikasi yang efektif cara ini dapat mengungkapkan banyak hal-hal kecil yang selama ini belum diamati oleh kebanyakan orang .

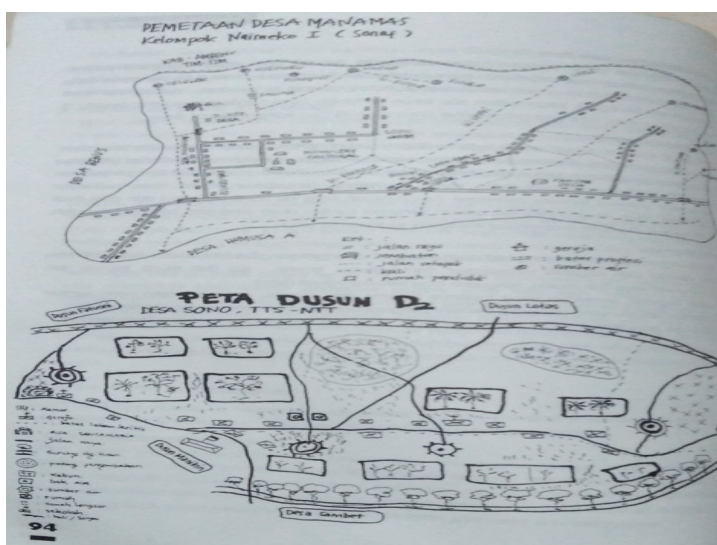
PROSES:

- Putuskan peta apa yang akan digambar (sosial, sumber daya, permukaan air tanah, dsb,)
- Jika memungkinkan kumpulkan peta-peta desa dan kampung, peta kemampuan pemanfaatan tanah dan keterangan lain yang mendukung.
- Terangkan dan diskusikan kegunaanya secara singkat
- Coba ikut sertakan penduduk desa dari berbagai kelompok umur dalam jumlah yang cukup.
- Bawa kertas gambar yang lebar, pena sketsa berwarna, tanda-tanda dsb.
- Untuk peragaan dan penggambaran peta partisipatif di atas tanah pilih suatu tempat yang cukup luas untuk menampung peserta yang banyak.
- Biarkan dulu penduduk desa menggambar dan menyelesaikan peta dengan cara sendiri.
- Jangan mengganggu atau memberi saran dari luar
- Kadang-kadang lebih dari 5 – 6 penduduk dewasa bekerja bersama-sama untuk sebuah peta besar yang digambar di atas tanah

- Bila kelompok penduduk desa selesai menggambar peta di tanah dan keluar, kelompok berikutnya yang berdiri di sekeliling dan melihat mungkin akan memberi usul dan mungkin perubahan-perubahan.
- Dorong mereka untuk memberi pendapatnya, dan perlu diberikan waktu yang cukup untuk terjadi interaksi antara penduduk desa dan orang luar.
- Setelah ini seseorang dari kelompok diminta untuk menerangkan peta daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk ditangani.
- Pada tahap ini kadang terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi terutama bila rencana partisipatif tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat, biarkan diskusi berlanjut dan proses ini akan memperbaiki rencana partisipatif.
- Peta sosial yang digambarkan dapat digunakan untuk membuat potensi wilayah yang spesifikasi

(sebaran, volume), dengan cara memberi tanda-tanda.

- Setelah acara tanya jawab tulis pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kelompok, serta catat jawaban serta solusi pemecahan yang disarankan kelompok lain.
- Jika mungkin buat beberapa dokumentasi dari peta dan usahakan gambar bisa terekam semua
- Berterima kasihlah secara resmi kepada penduduk desa, berilah tepuk tangan kelompok yang secara aktif dalam pembuatan peta.



Gambar: Contoh Peta Desa

b. Perubahan dan Kecenderungan

Cara ini sangat berguna dalam memahami perubahan dan kecenderungan populasi adat istiadat, pertanian, lahan pertanaman, dan banyak hal sosial ekonomi yang lainnya selama bertahun-tahun dengan cara ini kita dapat menggali masa lampau untuk kejadian yang penting, problem dan prospeknya yang masih diingat oleh penduduk desa.

Sebelum:

- ❑ Ciptakan suasana untuk diskusi partisipatif.
- ❑ Dorong penduduk desa yang tua dan berpengetahuan untuk sedapat mungkin ikut diskusi
- ❑ Bawa kertas dan pena sketsa

Selama:

- ❑ Awali diskusi dan ajukan pertanyaan kepada peserta yang tua lebih dahulu . Minta mereka untuk secara garis besar menyampaikan kejadian dan perubahan penting yang terjadi masa lalu. Jangan terlalu menekan tanggal, tahun tertentu, dan jangan memaksa
- ❑ Catat keterangan-keterangan yang telah dikemukakan peserta.

Sesudah:

- ❑ Bandingkan perubahan-perubahan yang ada, tentukan kecenderungannya (apakah curah hujan, luas hutan, populasi areal pertanaman, teknologi pertanian, populasi ternak, dan hubungannya.
- ❑ Berterimakasih kepada peserta yang sudah menyampaikan pengalamannya.

c. Diagram Venn (Hubungan Kelembagaan)

Tehnik ini membantu peserta untuk mengetahui perspektif penduduk desa terhadap pengaruh lembaga lokal dan luar desa di wilayah tertentu

Sebelum:

- ❑ Pilih tempat yang cocok dan ciptakan suasana untuk diskusi secara jujur
- ❑ Undang orang-orang dari semua seksi untuk penduduk desa untuk ikut serta dalam diskusi
- ❑ Awali diskusi sesuai dengan tujuan

- ❑ Buat lingkaran kertas dengan berbagai ukuran, dan dimungkinkan warna berbeda
- ❑ Bawa kertas lembaran lebar dan pensil sketsa

Selama:

- ❑ Tanya penduduk desa dan buatlah suatu daftar lembaga yang ada di desa, termasuk organisasi pemerintah dan non pemerintah.
- ❑ Mintalah pada peserta untuk memilih lingkaran kertas yang lebih besar untuk lembaga yang mereka anggap penting dan lingkaran yang lebih kecil untuk yang kurang penting juga tulis nama lembaga di lingkaran kertas yang bersangkutan.
- ❑ Kemudian mintalah mereka menggambar sebuah lingkaran di lembar kertas untuk menggambarkan desanya.
- ❑ Letakkan lingkaran kertas yang sudah ditulis nama-nama lembaga di sekeliling lingkaran desa tersebut. Jarak meletakkan lingkaran kertas dari pusat gambar (desa) adalah menunjukkan intensitas keterlibatan lembaga yang bersangkutan terhadap desa.
- ❑ Biarkan mereka diskusi letak dari masing-masing lingkaran untuk dirubah sesuai dengan pemahamannya sampai beberapa tahapan diskusi sampai gambar yang kompleks akan muncul (dan dimungkinkan gambar berhimpitan)

Sesudah:

- ❑ Coba untuk mengerti organisasi-organisasi tersebut dengan desa dari diagram yang terbentuk
- ❑ Catat semua hasil diskusi

d. Sketsa Kebun

Tehnik ini untuk memberi informasi tentang variasi tipe usaha tani yang berbeda dan susunan usaha taninya, hal ini untuk menolong kita mempelajari dan mengerti petaninya, alasan untuk membuat perencanaan usaha tani dan bagaimana selama-bertahun-tahun hal itu mengalami perubahan. Meskipun kelihatannya perencanaan usaha tani sangat sederhana dan bukan berupa hasil proses berpikir yang serius, tetapi study ini sering memperlihatkan banyak ragam ide petani yang menarik dan membangkitkan minat dari sudut pandang manajemen usaha tani dan pemanfaatan sumberdaya alam yang efektif di desa tertentu.



Gambar: Contoh Sketsa kebun

Sebelum:

- ❑ Berjalanlah keseluruhan pelosok penduduk desa untuk mengamati usaha tani pekarangan dan berbicaralah dengan penduduk desa dan pemilik usahatani tersebut
- ❑ Pilih beberapa usaha tani yang menurut pendapat anda menarik, bentuklah kelompok untuk mempelajari lebih banyak usahatani di desa

Selama:

- ❑ Bicaralah dengan pemilik usahatani yang akan dipelajari
- ❑ Berjalanlah mengelilingi usahatani tersebut secara bersama pemiliknya, teliti segala sesuatu secara mendetail
- ❑ Gambar secara teliti susunan rencana dan ciri-ciri usahatani tersebut
- ❑ Tanya, petani mengapa sesuatu disini dan tidak disana, apa keuntungan menanam suatu tanaman atau pohon pada tempat tertentu. Dan bagaimana dia memepergunakan bekas air cucian atau bagaimana tentang pupuk kandang atau sampah disimpan
- ❑ Mungkin terdapat banyak penjelasan yang mendukung suatu profil yang mungkin secara sosial, adat istiadat, agronomis atau yang lain.

Sesudah:

- ❑ Tanyalah petani mengenai rencana usahatani yang akan dilakukan mendatang dan berterimakasihlah kepada petani yang telah menyampaikan pengalamannya

e. Kalender Musim

Dengan menggunakan teknik ini akan didapatkan tentang pola tanam, permasalahan hama dan budidaya, pendapatan petani dari usahatani, penggunaan tenaga kerja, kebutuhan saprodi, populasi ternak, jumlah pakan dan lain-lain yang dapat dicari

Sebelum:

- ❑ Bagilah peserta diskusi dalam kelompok-kelompok dan diikuti oleh usia tua, dan perempuan
- ❑ Jelaskan maksud dan tujuan teknik ini beri kesempatan kepada petani untuk menanyakan segala sesuatunya, sehingga semuanya menjadi jelas.

Selama:

- ❑ Mulailah dengan menanyakan patokan waktu yang digunakan dalam kalender pertanian mereka. Apakah kalender Tradisional atukah kalender Nasional
- ❑ Mintalah salah satu petani untuk meletakkan batu atau tanda lain untuk menandai bulan-bulan dalam 1 tahun
- ❑ Jika tanda masing-masing bulan sudah siap tanyakan tentang curah hujan, pola tanam, pola serangan hama, kebutuhan tenaga kerja dan berikan alasan-alasan petani melakukan hal tersebut
- ❑ Gunakan biji-bijian, daun atau apa saja untuk memberi tanda sebagai simbol dalam kegiatan ini
- ❑ Hindari sejauh mungkin tulisan yang panjang, jika perlu mencatat buatlah di buku sendiri, jangan dilembaran pola pertanian musiman
- ❑ Bangunlah suatu proses, dimana semua petani bisa berpartisipasi. Untuk daerah tertentu biasanya pola tanam suah tidak teratur, mintalah keadaan yang sebenarnya bukan idealnya
- ❑ Lakukan analisa dari data-data tersebut diatas bersama dengan petani untuk menemukan masalah, penyebab masalah dan gagasan pemecahannya

Sesudah:

- ❑ Catat hasil diskusi secara lengkap dan ucapkan terimakasih kepada peserta

f. Matrik Rangkaing

Teknik matrik digunakan untuk menjelaskan penilaian-penilaian petani tentang hal-hal yang berhubungan dengan usaha taninya. Hasil yang didapat dari masing-masing musim, curahan tenaga kerja dari masing-masing jenis tanaman, biaya produksi, serangan hama, teknik-teknik pengendalian yang telah dicoba dan keberhasilannya, dan lain-lain.

Sebelum:

- ❑ Siapkan alat-alat seperti kertas plano, spidol, biji-bijian atau hasil pertanian yang lain yang dapat digunakan sebagai simbol

Selama:

- ❑ Berikan penjelasan tentang kegiatan se jelas mungkin dan berikan kesempatan petani untuk bertanya dan mendiskusikan tujuan dan proses dari kegiatan ini
- ❑ Mulailah dengan menanyakan pertanian apa saja yang dilakukan petani dalam 1 musim atau bisa juga menggunakan catatan dari hasil diskusi pola pertanian musiman
- ❑ Gunakan gambar sebagai simbol kegiatan jangan menggunakan tulisan
- ❑ Urutkan simbol itu kebawah atau kekanan dalam lembaran kertas yang cukup lebar dan lebih baik, petani yang menggambar nya sendiri
- ❑ Mintalah kepada petani faktor apa saja yang akan dilihat bersama seperti; tenaga kerja, ongkos haraga, asalnya yang sesuai dengan keinginan petani
- ❑ Jika petani belum mulai, maka harus segera dimulai dengan 1 atau 2 faktor
- ❑ Buatlah proses bersama, tetapi jenis tanaman yang berbeda juga untuk antar musim
- ❑ Mintalah pendapat atau alasan tentang hal-hal tersebut yang yakinkan bahwa setelah teknik ini selesai sudah mempunyai gambaran yang komplit tentang usahatani di desa tersebut

- ❑ Buatlah kesepakatan dengan petani, bahwa tim akan mengunjungi lahan mereka pagi harinya. Jika mungkin mintalah beberapa petani sebagai pemandu dalam kunjungan ke lahan tersebut
- ❑ Persiapkanlah peralatan untuk mencatat di lahan nanti. Jangan lupa membawa kantong plastik untuk membawa contoh serangga atau contoh tanaman yang terserang hama atau penyakit
- ❑ Berangkatlah pada saat pagi hari, sama seperti petani yang berangkat ke sawah
- ❑ Kunjungilah lahan per lahan, terutama yang ada petaninya
- ❑ Tanyakan kepada mereka masalah apa yang dihadapi oleh petani di lahan tersebut, mengapa demikian, bagaimana upaya mengatasinya, dan bagaimana rencana ke depan
- ❑ Ambilhama atau contoh tanaman yang menurut petani mengalami masalah (terserang hama), jika ada tim ini ada seorang pengendalian hama (sebaiknya demikian) mintalah kepadanya untuk megambil tanaman-tanaman yang terserang hama, juga mengumpulkan serangga-serangga yang mempunyai hubungan dengan masalah hama tersebut

Sesudah:

- ❑ Bandingkan masing-masing usahatani yang paling menguntungkan dari berbagai aspek
- ❑ Ucapan terimakasih kepada peserta

g. Pembagian Kerja Harian

Teknik ini digunakan untuk mengetahui pembagian kerja dalam kegiatan pertanian dan rumah tangga serta digunakan sebagai alat untuk menjelaskan kebutuhan dan keikutsertaan peserta wanita dalam usahatani. Dalam teknik ini kita bisa melihat besarnya peranan wanita dalam kegiatan pertanian dan pengambilan keputusan di bidang pertanian.

Sebelum:

- ❑ Peserta diskusi harus menyertakan peserrta pria maupun wanita dan harus memperhatikan waktu longgar wanita agar bisa ikut diskusi
- ❑ Buatlah matrik dalam kertas plano agar memudahkan peserta untuk mengisi kegiatan dan peranannya

Selama:

- ❑ Mari kita lihat berdasarkan sistem pertanian padi dan kebudayaan di desa apa peranan wanita dan pria dalam setiap kegiatan budidaya tanaman. Kita sepakati dulu jenis tanaman budidaya tanaman utama, kemudian kita membagi diri dalam kelompok kecil
- ❑ Tulis kegiatan-kegiatan yang penting dan diskusikan dengan peserta apakah kegiatan disepakati atau perlu penambahan
- ❑ Diskusikan dalam pengisian matrik sesuai dengan keterlibatan laki-laki maupun perempuan setiap kegiatan yang sudah disepakati.
- ❑ Volume kegiatan dapat terdiri bobot dengan prosentase

Setelah:

- ❑ Tunjuk masing-masing wakil kelompok untuk presentasi dari diskusi kelompok tersebut
- ❑ Catat hasil diskusi dan kesepakatan dari masing-masing kelompok menjadi kesimpulan dalam setiap kegiatan.

BAB 7

Pengorganisasian Masalah dan Analisis Gagasan Pemecahan Masalah

Semua data yang berupa permasalahan dan potensi yang telah dihasilkan dari penggalian data dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas seperti Mapping, Kalender musim, Diagram Ven, Sketsa kebun, Transek, Matrik Rangka, dsb. Selanjutnya dikumpulkan, tentunya data dari hasil diskusi kelompok dari masing-masing Teknik, kemungkinan data yang dihasilkan bisa sama, bisa kurang dan ada yang kurang jelas. Oleh sebab itu Pengorganisasian masalah bertujuan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, memformulasikan data serta mengklarifikasikan data. Sehingga data yg masih terpecah-pecah akan dipahami secara utuh oleh tim maupun oleh semua petani. Selanjutnya kalau sudah dipahami oleh semua petani maka data tersebut disepakati dan disetujui oleh semua peserta. Tahapan seperti ini adalah menjadi penting pada Metodologi PRA, karena pada metode ini data yang Valid adalah data yang dipahami dan disetujui bersama oleh semua peserta. (artinya bukan hanya dipahami oleh peneliti saja)

Pada tahapan ini, diskusi tidak hanya terbatas pada penyampaian data hasil survey saja tetapi prosesnya dalam memperoleh data juga harus menjadi bahan diskusi, agar dipahami bersama.

Demikian juga dengan melakukan penyampaian hasil pengumpulan data dan menganalisa bersama dengan petani, maka proses pengecekan kebenaran data dan analisis sekali lagi dilakukan bersama dengan petani. Kebenaran atas data dan analisisnya ini mutlak diperlukan supaya masalah dan pemecahannya dalam bentuk program kegiatan bisa terfokus dan tidak salah arah kelak dikemudian hari

Pengecekan data yang berulang-ulang bersama petani juga untuk menguji kebenaran bahwa permasalahan yang muncul adalah masalah sebenarnya dan merupakan kebutuhan riil (*real need*) bagi petani bukan hanya masalah yang berupa keinginan petani. Selanjutnya apabila permasalahan yang muncul

adalah permasalahan riil (akar masalah) dan itu berupa kebutuhan riil oleh petani akan menghasilkan penumbuhan partisipasi pada pelaksanaan program yang akan dirancang. Tetapi kalau yang muncul hanya masalah yang berupa keinginan petani maka tingkat partisipasi petani akan rendah dan beban pelaksanaan program akan diserahkan kepada orang luar (penyuluh). Seperti yang dikatakan Mardikanto (2003) bahwa, salah satu prinsip penyuluhan yang harus diingat oleh seorang penyuluh adalah, *“penyuluhan harus selalu mengacu kepada kebutuhan sasarannya”*.

Oleh sebab itu, agar pelaksanaan penyuluhan memperoleh tanggapan yang baik dari sasarannya, setiap penyuluh harus selalu berupaya untuk dapat:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sasaran,
- 2) Menunjukkan kepada sasaran tentang adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya.
- 3) Membantu sasaran untuk memenuhi kebutuhannya.

Berkaitan dengan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sasaran, perlu dipahami bahwa, pada dasarnya ada dua macam kebutuhan, yaitu, kebutuhan nyata (*“real need”*) dan kebutuhan yang dirasakan (*“felt need”*).

Kebutuhan nyata adalah kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, sedang kebutuhan yang dirasakan adalah kebutuhan yang benar-benar sudah dirasakan.

Pada tahapan pengorganisasian masalah juga dilanjutkan pada gagasan pemecahan masalah oleh petani maupun usulan oleh tim. Dengan pendiskusian gagasan-gagasan ini selain terjadi penyaringan teknologi secara awal juga terjadi proses membangun kepercayaan diri petani atas pilihan teknologi.

Prosesnya adalah

1. Diskusikan dengan anggota tim hasil-hasil yang telah didapatkan pada proses pengumpulan data. Sepakati hal-hal penting yang muncul dalam penggalian data tersebut. Identifikasikan masalah-masalah pertanian yang timbul dalam penggalian data tersebut. Catat juga data yang masih diragukan.
2. Buatlah catatan pada kertas hasil keputusan tim tersebut. Berikan juga rujukan dari teknik mana kesimpulan tersebut diambil. Jangan lupa mencatat pada kertas lain data yang masih ragu-ragu
3. Pasanglah di dinding semua hasil penggalian data yang dilakukan.
4. Jelaskan pada petani yang hadir bahwa tim meminta pengecekan sekali lagi atas hasil tersebut. Beri kesempatan pada petani untuk melakukan koreksi. Jika perlu ada anggota memandu proses tersebut dengan membacakan hasil dan kesimpulan.

5. Jika pembetulan dilakukan mintalah kepada petani untuk memberi data yang masih perlu diperdalam, terutama pada analisisnya
6. Jelaskan kesimpulan yang didapat dan mintalah petani melakukan koreksi atas kesimpulan yang telah dilakukan oleh tim
7. Diskusikan permasalahan-permasalahan yang bisa dipecahkan bersama mintalah kepada petani untuk memberi usulan untuk memecahkan masalah tersebut
8. Jika permasalahannya sudah dikuasai dan tim ataupun petani merasa mempunyai jawaban yang baik dan telah teruji di tempat lain, kegiatan bisa dilanjutkan dengan pendiskusian gagasan pemecahan, jika tim atau petani belum mempunyai gagasan lebih baik disepakati untuk mencari gagasan-gagasan pemecahan masalah libatkan petani dalam kegiatan pencarian gagasan pemecahan masalah dari luar tersebut.
9. Tahapan Pengorganisasian masalah dan Potensi ini merupakan contoh yang di tulis dari hasil

PRA di desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali

- a) Langkah Pertama adalah Mengumpulkan semua data dari semua teknis yang telah diterapkan dalam penggalian data dengan PRA, Tehnik PRA yang digunakan untuk mengali data di Desa Kunti Kecamatan Andong adalah: (1) Pemetaan, (2) Kalender Musim (3). Diagram Ven, (4) Transek (5). Sketsa kebun, (6) Matrik rangking dan, (7). Pembagian kerja harian.

Pada Langkah ini menyatukan semua data yang dihasilkan dari 7 teknis tersebut kedalam suatu table berikut ini, pada langkah ini fasilitator harus membantu dalam mengorganisasikan masalah dan potensi dari hasil diskusi kelompok sehingga tidak terjadi permasalahan dan potensi yang muncul ganda. Sebagai alat bantu menggunakan tabel berikut ini:

No.	Masalah	Potensi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- b) Langkah Kedua adalah Mengklasifikasikan Permasalahan dan potensi kedalam kelompok-kelompok usaha tani:

Langkah ini adalah bermanfaat kepada petani untuk mudah dipahami oleh peserta diskusi:

c) Langkah Ketiga adalah Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Pada langkah ini adalah mencari akar dari permasalahan yang muncul dari tahap sebelumnya, sehingga dari masalah dimungkinkan akan muncul masalah sebenarnya dan mungkin bisa lebih dari satu penyebab. Dari penyebab inilah kemudian dicarikan alternatif tindakan dan alternatif ini dimungkinkan akan muncul banyak alternatif tindakan. Selanjutnya dari beberapa alternatif tindakan dipilih yang paling layak dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada masyarakat desa.

Kelompok Pemukiman

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif tindakan	Tindakan yang layak
1.					
2.					
3.					

d) Langkah keempat adalah Penentuan Peringkat tindakan

Penentuan Peringkat tindakan, sehingga akan bisa mengklasifikasikan waktu pelaksanaan tindakan. Pada pembuatan ranking dengan metode scoring ini setiap peserta mempunyai hak yang sama dalam menilai kegiatan, baik itu perangkat desa, dinas pemerintah ataupun petani miskin. Sehingga dalam proses ini berjalan demokrasi.

Didalam membuat scoring pada metodologi PRA sangat banyak variasinya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat, tetapi yang paling penting adalah harus terlebih dahulu ada pemahaman bersama tentang parameter yang digunakan dan cara menilainya, sehingga setiap petani dalam menilai betul-betul sudah didasarkan dengan pertimbangan yang matang. Dalam scoring ini kegiatan yang mempunyai nilai tinggi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut untuk segera dilakukan, urutan ranking ini menunjukkan urutan prioritas kegiatan yang akan dilakukan.

No.	Tindakan yang layak	Dirasakan orang banyak	Berpengaruh terhadap pendapatan	Dukungan potensi	Jumlah nilai	Rangking
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Dalam melakukan rangking ini bisa memberi skor:

Rendah nilai: 1; Sedang nilai: 2; Tinggi nilai: 3.

Jumlah nilai yang tinggi mempunyai peringkat pertama yang harus mendapatkan tindakan.

Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kegiatan ini petani terlibat secara penuh, selain itu dalam penyusunan kegiatan stake holder juga diundang untuk pembagian peran dalam mensukseskan kegiatan.

Dalam penyusunan kegiatan akan dibuat bertahap selama 3 tahun, karena hal ini dilihat kemampuan petani untuk dapat melakukan kegiatan, dan diusahakan agar tidak mengganggu kegiatan usaha taninya. Dalam penyusunan perencanaan harus diupayakan keswadayaan local harus ada, karena hal ini menunjukkan partisipasi petani dan untuk menjamin keberlanjutan program.

No.	Kegiatan	Tujuan	Target	Waktu Bulan ke:	Penjab	Sumber Dana Dalam / Luar
1.						
2.						
3.						
4.						
1.						
2.						
3.						
1.						
2.						
3.						

Walaupun pelaksanaan kegiatan sudah tersusun dalam perencanaan dalam perencanaan yang cukup jelas, tetapi perencanaan ini bukan harga mati, maksudnya harus selalu ada monitoring dan evaluasi yang waktunya dapat disepakati dengan petani dan steak holder. Monitoring dan Evaluasi secara berkala ini untuk mengantisipasi apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan disbanding perencanaan yang telah dibuat. Selain itu juga untuk mengantisipasi apa kondisi eksternal berubah yang sangat drastic sehingga perencanaan perlu disesuaikan.

Perencanaan Desa menggunakan Metodelogi P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa)

- I. Langkah Pertama adalah Melakukan Identifikasi Masalah dan Potensi Dengan Menggunakan Alat:
1. Sketsa Desa
 2. Kalender Musim
 3. Bagan Kelembagaan

Untuk membantu diskusi tersebut bisa digunakan tabel sebagai berikut:

No.	Masalah	Potensi

Pada pelaksanaan ini akan dihasilkan tiga Tabel. Yang terdiri dari tabel peta desa, Kalender musim dan bagan kelembagaan

- II. Langkah Kedua adalah Pengorganisasian Masalah dan Potensi.

Pada Langkah ini menyatukan dari tiga tabel ini menjadi satu tabel, pada langkah ini fasilitator harus membantu dalam mengorganisasikan masalah dan potensi dari ketiga kelompok tabel tadi sehingga tidak terjadi permasalahan dan potensi yang muncul ganda. Sebagai alat bantu menggunakan tabel berikut ini:

No.	Masalah	Potensi
	Gabungan dari masalah tabel: Pemetaan, kalender musim dan hubungan kelembagaan	Gabungan dari potensi tabel: Pemetaan, kalender musim dan hubungan kelembagaan

III. Langkah Ketiga adalah Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Pada langkah ini adalah mencari akar dari permasalahan yang muncul dari tabel II, sehingga dari masalah dimungkinkan akan muncul masalah sebenarnya dan mungkin bisa lebih dari satu penyebab. Dari penyebab inilah kemudian dicarikan alternatif tindakan dan alternatif ini dimungkinkan akan muncul banyak alternatif tindakan. Selanjutnya dari dari beberapa alternatif tindakan dipilih yang paling layak dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada masyarakat desa.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif tindakan pemecahan masalah	Tindakan yang layak
	Dari tabel II	Cari akar masalah dari kolom 2	Dari tabel II	Cari dari kolom 3	Seleksi dari kolom 5 dengan pertimbangan kolom 4

IV. Langkah keempat adalah Penentuan Peringkat tindakan, sehingga akan bisa mengklasifikasikan waktu pelaksanaan tindakan.

No.	Tindakan yang layak	Dirasakan orang banyak	Berpengaruh terhadap pendapatan	Dukungan potensi	Jumlah nilai	Rangking
	Diambil dari tabel III, kolom 6					

Dalam melakukan rangking ini bisa memberi skor:

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Jumlah nilai yang tinggi mempunyai peringkat pertama yang harus mendapatkan tindakan.

VI. Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kegiatan ini dapat dibantu dengan tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Tujuan	Target	Waktu	Penjab	Sumber Dana Swadaya & Dari luar
1.	Jangka Pendek					
2.	Jangka Sedang					
3.	Jangka Panjang					

Pada Langkah ini kegiatan diambilkan dari tabel IV yaitu alternatif tindakan, dalam penyusunan kegiatan ini diurutkan dari ranking yang telah disusun dari tabel IV. Selanjutnya Dari kegiatan ini di kelompokkan menjadi kegiatan yang dapat dilakukan dalam **jangka pendek, jangka menengah dan Jangka panjang.**

ACUAN MEMBUAT PERENCANAAN KELOMPOK PETANI SECARA PARTISIPATIF

- I. Langkah Pertama adalah Melakukan Identifikasi Masalah dan Potensi dalam rangka pengembangan kelompok untuk menuju kemandirian:

Pada langkah ini sebaiknya peserta yang hadir dalam pertemuan dibagi menjadi dua kelompok untuk membahas dua tabel.

- A. Ditingkat Internal Dengan Menggunakan Alat:

Untuk membantu diskusi tersebut bisa digunakan tabel sebagai berikut:

No.	Masalah	Potensi

- B. Ditingkat Eksternal Dengan Menggunakan Alat:

Untuk membantu diskusi tersebut bisa digunakan tabel sebagai berikut:

No.	Masalah	Potensi

Setelah diskusi kelompok selesai dilanjutkan diskusi pleno, masing masing kelompok untuk presentasi dan ditanggapi peserta pertemuan. Setelah masing-masing kelompok presentasi dan isinya disepakati peserta maka dilanjutkan langkah ke II.

- II. Langkah Kedua adalah Pengorganisasian Masalah dan Potensi.

Pada Langkah ini menyatukan dari 2 tabel ini menjadi satu tabel, pada langkah ini fasilitator harus membantu dalam mengorganisasikan masalah dan potensi dari ke dua kelompok tabel tadi sehingga tidaka terjadi permasalahan dan potensi yang muncul ganda. Sebagai alat bantu menggunakan tabel berikut ini:

No.	Masalah	Potensi
	Gabungan dari masalah tabel: Eksternal dan internal	Gabungan dari potensi tabel: Eksternal dan Internal

Setiap kartu yang muncul di tabel harus disepakati oleh peserta, kartu tersebut tetap dipertahankan atau dihilangkan atau diganti istilah lain.

III. Langkah Ketiga adalah Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Pada langkah ini adalah mencari akar dari permasalahan yang muncul dari tabel II, sehingga dari masalah dimungkinkan akan muncul masalah sebenarnya dan mungkin bisa lebih dari satu penyebab. Dari penyebab inilah kemudian dicarikan alternatif tindakan dan alternatif ini dimungkinkan akan muncul banyak alternatif tindakan (lebih dari satu alternatif tindakan). Selanjutnya dari dari beberapa alternatif tindakan dipilih yang paling layak dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada masyarakat desa.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif tindakan pemecahan masalah	Tindakan yang layak
	Dari tabel II	Cari akar masalah dari kolom 2	Dari tabel II	Cari dari kolom 3	Seleksi dari kolom 5 dengan pertimbangan kolom 4

IV. Langkah keempat adalah Penentuan Peringkat tindakan, sehingga akan bisa mengklasifikasikan waktu pelaksanaan tindakan.

No.	Tindakan yang Layak	Dirasakan oleh banyak anggota	Berpengaruh terhadap pendapatan	Ada dukungan potensi	Jumlah nilai	Rangking
	Diambil dari tabel III, kolom 6					

Dalam melakukan rangking ini bisa memberi skor:

- A. Rendah = 1
- B. Sedang = 2
- C. Tinggi = 3

Jumlah nilai yang tinggi mempunyai peringkat pertama yang harus mendapatkan tindakan.

VI. Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kegiatan ini dapat dibantu dengan tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Tujuan	Target	Waktu	Penjab	Sumber Dana Swadaya & Dari luar
1.	Jangka Pendek					
2.	Jangka Sedang					
3.	Jangka Panjang					

Pada Langkah ini kegiatan diambilkan dari tabel IV yaitu alternatif tindakan, dalam penyusunan kegiatan ini diurutkan dari ranking yang telah disusun dari tabel IV. Selanjutnya Dari kegiatan ini di kelompokkan menjadi kegiatan yang dapat dilakukan dalam **jangka pendek, jangka menengah dan Jangka panjang.**

**ACUAN MEMBUAT PERENCANAAN USAHA BERSAMA
DALAM KELOMPOK PETANI KECIL**

Membuat perencanaan KUB menggunakan metodologi Matrik Rangkings Usaha:

Langkah pertama adalah:

1. Buatlah daftar dari semua usaha yang sudah dilakukan oleh anggota kelompok tani.
2. Setelah teridentifikasi dari semua jenis usaha yang dilakukan kelompok maka dilanjutkan dengan mengana lisa usaha dan keuntungan yang diperoleh dari semua jenis usaha.

Jenis Usaha	Biaya Produksi	Hasil produksi	Pendapatan bersih

3. Langkah selanjutnya adalah Membuat rangking dari jenis usaha yang dipertimbangkan pada masalah dan potensinya.

Jenis usaha	Nilai pendapatan	Masalah Bahan baku	Masalah pemasaran	Potensi Internal	Potensi Eksternal	Nilai

5. Langkah selanjutnya setelah diketemukan jenis usaha yang paling menguntungkan apabila dilakukan bersama maka langkah selanjutnya adalah:
6. Membuat perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan agar KUB itu berhasil, dengan membuat tabel sebagai berikut:

Dalam penyusunan rencana kegiatan ini dapat dibantu dengan tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Tujuan	Target	Waktu	Penjab	Sumber Dana Swadaya & Dari luar
1.						
2.						
3.						

Pemilihan Kader Kelompok

Latar Belakang:

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Penjelasan fasilitator tentang pentingnya kader lokal untuk menuju kemandirian kelompok
2. Langkah selanjutnya adalah membuat persyaratan kelompok dengan metodologi brain storming
3. Merumuskan bersama tentang hak dan kewajiban kader lokal
4. Membuat aturan pemilihan kader secara demokrasi
5. Pemilihan secara langsung dan demokrasi
6. Bagi kader lokal yang terpilih selanjutnya membuat pernyataan tertulis untuk siap menjadi kader.

Daftar Pustaka

- Adinda Van Hemelrijk, 2002, *Gender Toolkit dan PRA*, VECO-RI, Denpasar
- Bambang Ismawan, 2000, *Pemberdayaan Orang Miskin*, Pupa Swara, Jakarta
- Budi Wibhawa, Santoso Tri Raharjo & Meilany Budiarti. 2010. *Dasar-Dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- KPDTNT (Konsursium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara), 1996, *Berbuat Bersama Berperan Setara, Acuan Penerapan PRA*, Studio Driya Media, Bandung
- Edi Suharto. 2010. *CSR & COMDEV*. Bandung: Alfabeta.
- Isbandi Rukminto A. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Jim Ife. 2006. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 348,349
- Mansour Fakih, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Tranformasi Sosial: Pergolakan Ideologi Di Dunia LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mardikanto.T., 2003, *Redifinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, PUSPA, Sukoharjo-Solo
- Riza Primahendra, Ferdy Santoso Nggao dan Malakias Martono, 2003, *Kemiskinan dan Kemandirian*, Yayasan Bina Swadaya, Jakarta
- Roem Topatimasang, Russ Dilts, Mansour Fakih dan Utomo Dananjaya (1990), *Belajar dari Pengalaman*, P3M, Jakarta
- Roem Topatimasang, 1990, *Belajar Dari Pengalaman*, P3M, Jakarta
- Rubin & Rubin. 1992. *Community Organizing & Development*. New York: Machmilan Publishing Company.
- Susetiawan, 1991, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Yogyakarta